

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

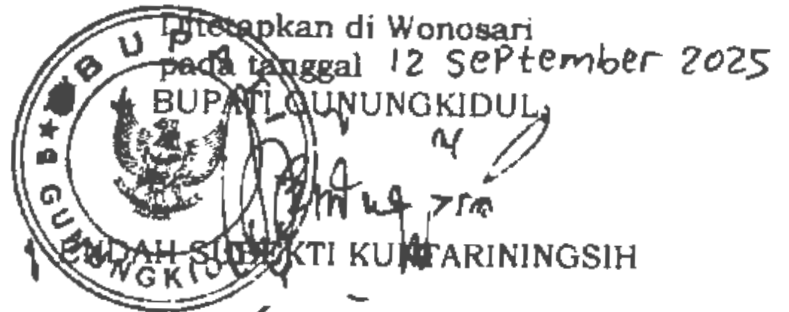
Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

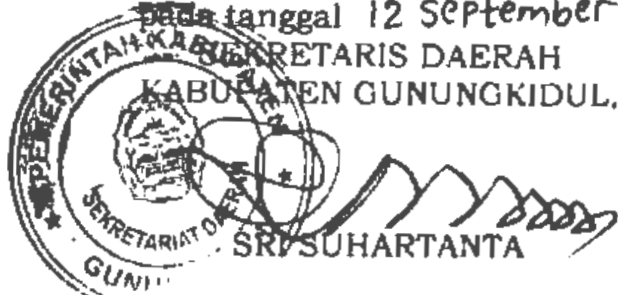
- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.



Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL.



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

Daftar isi

BAB I Pendahuluan.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	7
2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah.....	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Daerah.....	19
2.1.4 Tantangan dan Peluang.....	38
2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan.....	41
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.2.2 Isu Strategis	44
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	55
3.1 Visi Misi dan program prioritas Pembangunan daerah.....	55
3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah.....	56
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	58
3.4 Pentahapan Renstra.....	58
3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	59
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	61
4.1 Program Perangkat Daerah.....	61
4.2 Kegiatan Perangkat Daerah.....	61
4.3 Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	62
4.4 Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah.....	103
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.....	107
4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 107	
BAB V Penutup.....	109

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 Tahun 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

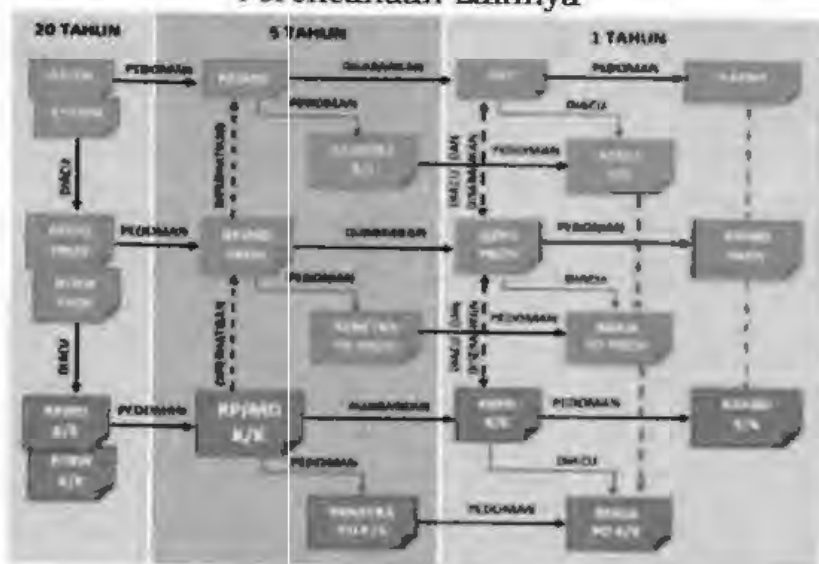
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul dan bersifat indikatif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan Renstra BPBD dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda Kabupaten Gunungkidul dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya



Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan melalui sebagai berikut:

- Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan dimulai dengan kegiatan orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja serta pengumpulan data dan informasi.
- Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra SKPD.
- Tahapan penetapan Renstra SKPD.

Renstra BPBD Kabupaten Gunungkidul disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Gunungkidul dengan memperhatikan indikator kinerja Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Renstra BPBD DIY, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
- Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2025-2029;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 44);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

19. Peraturan Bupati no 24 Tahun 2025 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul;
20. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

- a. Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2025-2029 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- b. Sebagai kerangka dasar bagi BPBD Kabupaten Gunungkidul dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
- c. Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja BPBD Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3.2 Tujuan

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c. Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur.
- d. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Daerah
 - 2.1.4 Tantangan dan Peluang
 - 2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2 Isu Strategis



BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1 Visi Misi dan program prioritas Pembangunan daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi Perangkat Daerah
- 3.4 Penahapan Renstra
- 3.5 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Program Perangkat Daerah;
- 4.2 Kegiatan Perangkat Daerah ;
- 4.3 Sub Kegiatan Perangkat Daerah;
- 4.4 Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Perangkat Daerah;
- 4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- 4.6 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, menyebutkan bahwa tugas BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.

1. Tugas BPBD

Berdasarkan Pasal 101 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, tugas BPBD adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pasal 5 menyebutkan bahwa UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan.

2. Fungsi BPBD

Berdasarkan Pasal 102 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, fungsi BPBD, antara lain:

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
- d. penetapan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- e. penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;



- f. pelaksanaan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - g. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
 - h. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - i. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - j. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - k. pelaksanaan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - l. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - m. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanggulangan bencana;
 - n. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan bencana;
 - o. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan bencana; dan
 - q. pengelolaan UPT.
3. Struktur Organisasi BPBD
- Berdasarkan Pasal 100 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah, struktur organisasi BPBD, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, yang terdiri atas:
 - a) Subbagian Umum; dan
 - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 4. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 5. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 6. UPT; dan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPBD



Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pelaksana

Tugas : melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi: prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penanggulangan bencana;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, pada saat bencana, dan pasca bencana;
- e. pengomandoan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat;
- f. pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- h. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penanggulangan bencana;
- i. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan bencana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan bencana; dan
- k. pengelolaan UPT.

2. Sekretariat Unsur Pelaksana

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
- d. penyusunan rencana kerja sama Badan;
- e. penyusunan perjanjian kinerja Badan;
- f. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;

- g. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang penanggulangan bencana;
- h. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang penanggulangan bencana;
- i. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. penyusunan laporan kinerja Badan;
- k. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Badan;
- m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Badan;
- o. penyiapan bahan dan penatausahaan di bidang penanggulangan bencana;
- p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
- q. pelayanan administratif dan fungsional;
- r. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Sekretariat;
- s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
- t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
- u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu 2 sub bagian yaitu:

1) Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum mempunyai fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
- pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundangundangan;
- pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Badan;
- penyusunan rincian tugas Badan;
- pengelolaan urusan rumah tangga;
- pengelolaan barang milik daerah;
- pengelolaan perpustakaan dinas;
- pelaksanaan hubungan masyarakat;
- penyusunan rencana kerja sama;
- pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Badan;
- pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- pengelolaan perjalanan dinas;

- pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
- pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan pengembangan pegawai;
- penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
- pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
- penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum.

2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan dan pengadministrasian keuangan. Fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
- penyusunan rancangan kebijakan umum Badan;
- pelaksanaan analisis dan penyajian data;
- pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
- penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Badan;
- penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- penyiapan bahan pengendalian kegiatan Badan;
- penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Badan;
- penyusunan laporan keuangan;
- penyiapan bahan perhitungan anggaran Badan;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

3. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyelenggarakan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - c. penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
 - d. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 - e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi;
 - f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
 Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) kelompok kerja, yang memiliki tugas dan fungsi:
 - 1) Pelaksanaan tugas bidang pencegahan bencana
 - penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
 - pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana; dan
 - penyelenggaraan dan pengoordinasian upaya pengurangan risiko bencana;
 - 2) Pelaksanaan tugas bidang kesiapsiagaan bencana
 - penyelenggaraan dan pengoordinasian kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat;
 - pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana; dan
 - peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
 - 3) Pelaksanaan tugas bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
 - pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - pelaksanaan koordinasi rehabilitasi pada wilayah pasca bencana;
 - pelaksanaan koordinasi pemulihan dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana; dan

- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik. Fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- perumusan kebijakan teknis di Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- penyediaan dan pengoordinasian penanganan pengungsi dan logistik serta peralatan penanggulangan bencana;
- pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh 2 (dua) kelompok kerja :

1) Pelaksanaan tugas bidang kedaruratan

- pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
- pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- penentuan strategi keadaan darurat bencana;
- penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana; dan
- pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana

2) Pelaksanaan tugas bidang logistik dan peralatan

- penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan logistik penanggulangan bencana;
- penyelenggaraan dan pengoordinasian penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lainnya untuk penanggulangan bencana;
- pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan pengungsi;
- penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
- fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pengadaan, penerimaan, distribusi, pengedaran dan pemeliharaan peralatan penanggulangan bencana;
- penyelenggaraan pengelolaan peralatan penanggulangan bencana;

- peningkatan kapasitas bidang peralatan penanggulangan bencana; dan
- penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

5. Unit Pelaksana Teknis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yaitu UPT Pemadam Kebakaran, yang merupakan UPT kelas A pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul (Perbub No 62 Tahun 2023), dan dipimpin oleh Kepala UPT.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi
Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran



UPT Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan UPT Pemadam Kebakaran;
- penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pemadam Kebakaran;
- pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- penyelenggaraan pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran;
- pelaksanaan diseminasi dan bimbingan teknis di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran;
- pelaksanaan penyelamatan darurat terhadap jiwa manusia dan hewan yang terancam keselamatannya dan memerlukan bantuan sarana prasarana pemadam kebakaran;
- pengelolaan ketatausahaan UPT Pemadam Kebakaran;
- pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pemadam Kebakaran;
- penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Pemadam Kebakaran;
- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT dibantu oleh Subbagian Tata Usaha. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan pemadam kebakaran, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan;
- penyusunan rencana operasional pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Pemadam Kebakaran;
- pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Pemadam Kebakaran;
- pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Pemadam Kebakaran;
- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengamanan terhadap ancaman bencana kebakaran dan penyelamatan darurat jiwa manusia dan hewan;
- pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat;
- pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Pemadam Kebakaran;
- pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pemadam Kebakaran;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pemadam Kebakaran; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pemadam Kebakaran.

6. Unit Satgas BPBD

Dalam pelaksanaan Sub Urusan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki 2 Satuan Tugas (Satgas). Satuan Tugas ini berada di bawah koordinasi bidang teknis namun pada saat-saat tertentu bertugas dengan sistem komando dari perintah langsung Komandan Penanganan Darurat Bencana sesuai SOP dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Namun secara hierarki kelembagaan, Satgas tersebut belum masuk dalam struktur organisasi dan kelembagaan BPBD Kabupaten Gunungkidul.

Unit pelayanan dalam bentuk Satuan Tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

a) Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB)

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi.

b) Tim Reaksi Cepat (TRC)

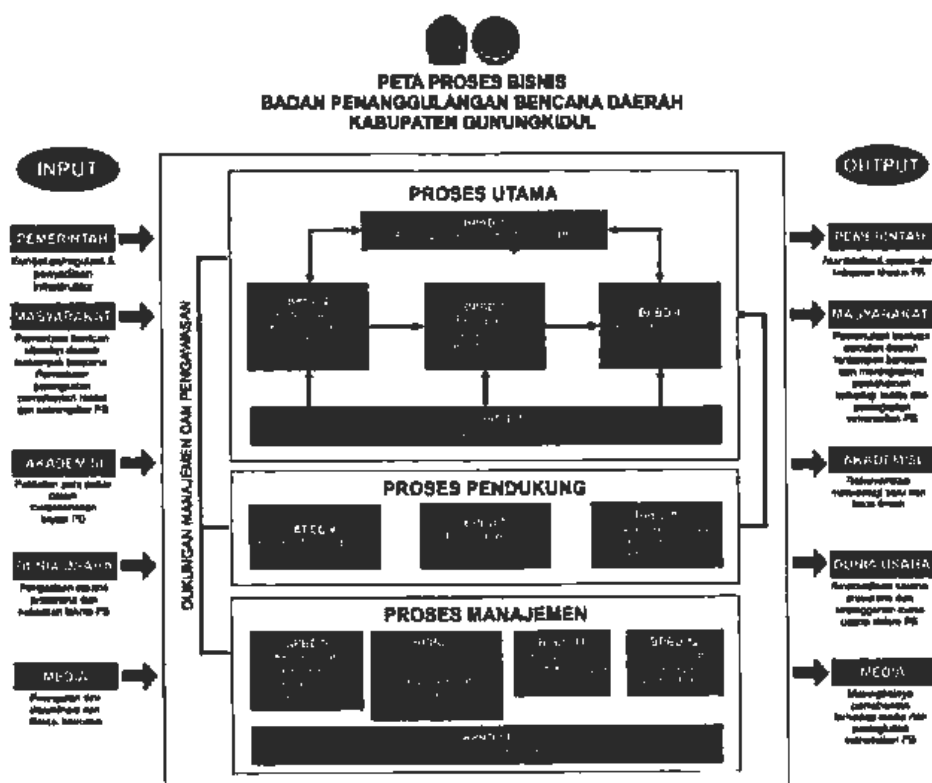
Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana dilaksanakan oleh tim

reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat dibawah komando Komandan Penanganan Darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya. Sedangkan tugas pokok TRC diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat BNPB.

TRC merupakan suatu tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Gunungkidul yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan pada komandan lapangan dalam penanganan darurat bencana.

Proses bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3
Peta Proses Bisnis
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul



Dalam Proses Bisnis ini menjelaskan dalam setiap tahap penanggulangan bencana dari kesiapsiagaan Respons hingga pemulihan. Ketiga rangkaian ini memerlukan koordinasi yang baik dan implementasi yang tepat agar dampak bencana dapat di minimalisir, serta pemulihan kehidupan masyarakat dapat dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPBD, maka segala sumber daya yang dimiliki, baik sumber dana, sumber daya manusia dan sarana dan prasarana harus dikelola secara efektif dan efisien.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan BPBD Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 sejumlah 83 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia						
ASN	PPPK	Administrasi Perkantoran	TIIL		UPT Pemadam Kebakaran	TRC (Tim reaksi Cepat)
			Pusdalops			
18	3	8	6		24	24

Secara rinci data pegawai negeri sipil tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah ASN BPBD berdasarkan pangkat/golongan

NoKategori		Golongan/Ruang									Kelas Jabatan		
		II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	7	9
1	Eselon II b												
2	Eselon II a										1		
3	Eselon III a								1				
4	Eselon III b							1	2				
5	Eselon IV a					1	1	2	1				
6	Eselon IV b						1						
7	Fungsional Umum	1	3		2	1							
8	PPPK											1	2
	Jumlah	1	3		2	2	3	2	4		1	1	2

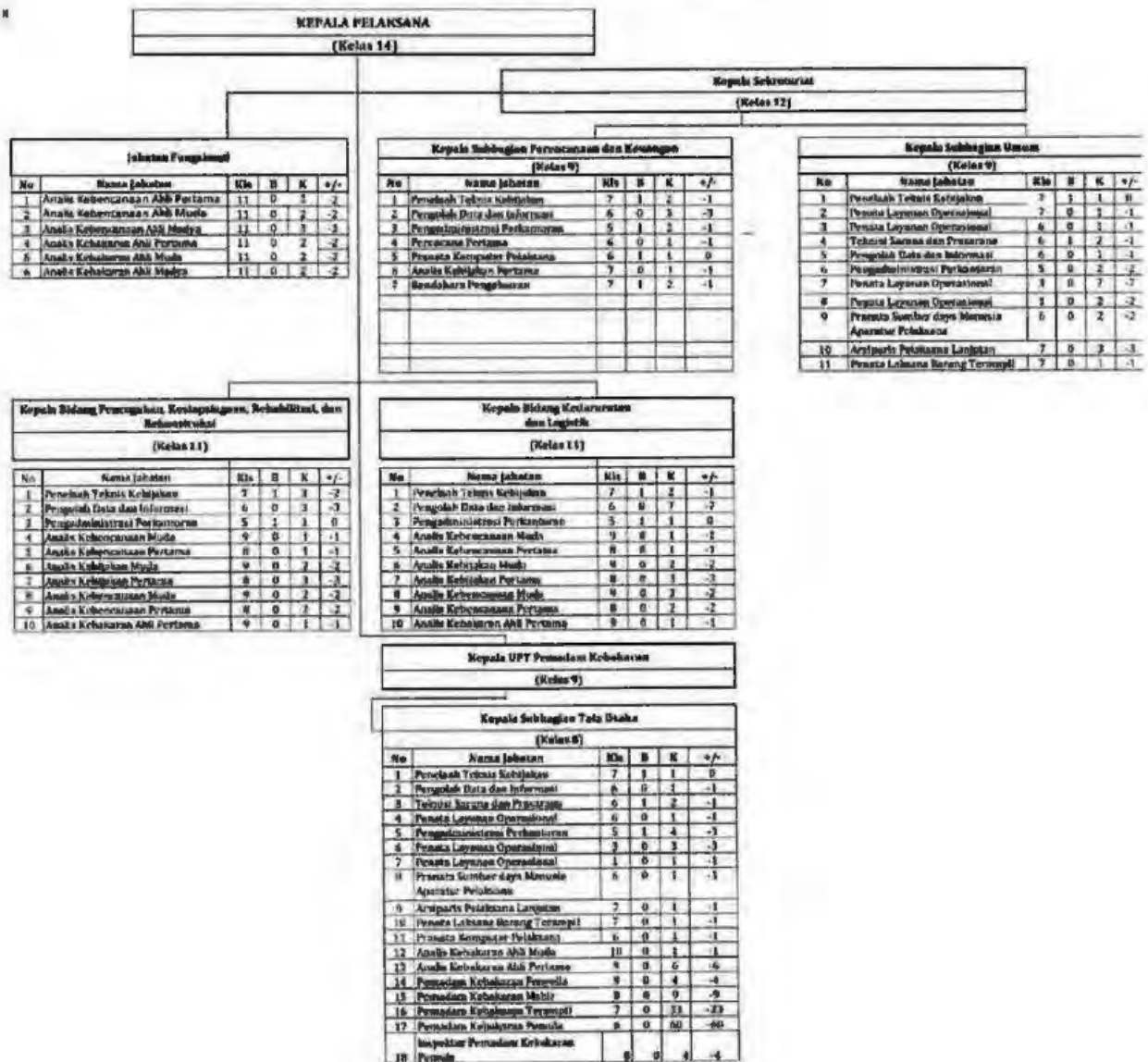
Tabel 2.3
Jumlah ASN BPBD berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Kategori	Jenis Kelamin	Pendidikan					
			L	P	SMP	SLTA	DIII	SL / DIV
1	Eselon II b							
2	Eselon II a	1						1
3	Eselon III a	1						1
4	Eselon III b	3					1	2
5	Eselon IV a	4	1			1	3	2
6	Eselon IV b	1					1	
7	Fungsional Umum	6	1		3	3	0	
8	PPPK	3				1	2	
	Jumlah	19	2		3	5	7	6

Pengelolaan sumber daya manusia juga harus dilaksanakan untuk mewujudkan profesionalisme aparatur. Pengelolaan ini meliputi: pengembangan kemampuan dan keterampilan aparatur, penataan aparatur sesuai dengan kebutuhan, pengembangan jenjang kepangkatan dan karier serta pembinaan aparatur. Pengelolaan pengembangan kualitas sumber daya manusia terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil (baik individu maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya) dapat ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi BPBD.

Gambar 2.4.

Pemenuhan Anjab Tahun 2024



2. Sumber Dana

Sumber dana (anggaran) merupakan modal utama sebuah organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh sebab itu, maka pengelolaan sumber dana (anggaran) harus dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPBD didukung anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul, APBD Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta bantuan Lembaga Masyarakat.

3. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana (barang inventaris dan aset) merupakan unsur penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, efisiensi dan akuntabilitas anggaran.

Disamping itu penggunaan dan pemeliharaan terhadap aset-aset berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan penuh tanggung jawab, untuk meminimalkan kerusakan yang mungkin timbul. Laporan barang inventaris dan aset dilakukan secara berkala dan

berkesinambungan. Selain dari pemerintah daerah BPBD juga dibantu sarana dan prasarana hibah dari BNPB yang sangat membantu dalam operasional ketugasan BPBD. Data terkait aset BPBD untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Data Aset BPBD Kabupaten Gunungkidul

Nama Bidang Barang	Harga (Rp)
A. TANAH/BANGUNAN	
Tanah	-
B. PERALATAN DAN MESIN	
a. Alat – alat Besar	64.900.000,00
b. Alat – alat Angkut	7.553.000.489,00
c. Alat – alat Bengkel dan Alat Ukur	103.260.500,00
d. Alat – alat Pertanian	113.483.000,00
e. Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga	1.334.068.475
f. Alat – alat Studio dan Komunikasi	207.130.118,00
h. Alat – alat Kedokteran	138.420.000,00
i. Alat – alat Laboratorium	5.284.000,00
j. Alat – alat persenjataan Keamanan	152.863.300,00
k. Komputer	183.877.600,00
l. Alat keselamatan kerja	66.900.000,00
C. GEDUNG DAN BANGUNAN	
a. Bangunan Gedung	944.408.317,68
b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.613.678.185,92
D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
a. Jalan dan Jembatan	-
b. Bangunan Air	387.108.916,4
c. Instalasi listrik	
d. Jaringan	365.602.412,34
E. ASET TETAP LAINNYA	
a. Buku Perpustakaan	-
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-
c. Hewan Ternak dan Tanaman	-
d. Aset Tetap Dalam Renovasi	2.877.970.945,65
JUMLAH	16.111.956.259,99

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk mengkomodir penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan telah ditunjukan dengan menempatkan isu penanggulangan bencana sebagai bagian dari RPJMD tahun 2025-2029. Penanggulangan bencana dititikberatkan pada pengelolaan risiko bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Potensi bencana di Kabupaten Gunungkidul memiliki 9 potensi bencana yang sudah teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya, 9 potensi bencana tersebut antara lain : banjir, cuaca ekstrem, gempabumi, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami, dan epidemi dan wabah penyakit.

Hasil kajian risiko bencana Kabupaten Gunungkidul secara singkat diuraikan sebagai berikut ini:

1. Bencana Banjir

Analisis bahaya banjir menghasilkan luas daerah bahaya banjir dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Gunungkidul. Total luas yang memiliki potensi bahaya banjir di Kabupaten Gunungkidul

Tinggi

Peta Risiko Banjir di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

2. Bencana Cuaca Ekstrem

Berdasarkan analisis risiko bencana cuaca ekstrem secara umum Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh kelas risiko sedang dengan luasan daerah berisiko sedang adalah 70.056,63 ha. Sedangkan kelas risiko rendah memiliki luasan sebesar 9.766,17 ha. Jumlah wilayah yang tergolong ke dalam kelas risiko rendah sebanyak 1 kapanewon dan kelas risiko sedang sebanyak 17 kapanewon. Kapanewon Playen memiliki wilayah bahaya cuaca ekstrem terluas dibandingkan dengan kapanewon lainnya dengan luas bahaya 9.142,11 Ha, sedangkan Kapanewon Gedangsari memiliki luas bahaya cuaca ekstrem terkecil dengan luas 1.378,80 Ha. Berdasarkan kelas bahaya tingkat kapanewon, maka di Kabupaten Gunungkidul termasuk dalam kelas bahaya cuaca ekstrem tinggi.

Gambar 2.6
Peta Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

3. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan analisis risiko bencana gempabumi Masing – masing kapanewon di Kabupaten Gunungkidul memiliki kelas bahaya berbeda berdasarkan penarikan kesimpulan kelas maksimum kalurahan yang ada di wilayah tersebut. Kapanewon Playen memiliki wilayah bahaya gempabumi terluas dibandingkan dengan kapanewon lainnya dengan luas bahaya 10.724,36 Ha, sedangkan Kapanewon Ngawen memiliki luas bahaya gempa bumi terkecil dengan luas 5.025,47 Ha. Jumlah wilayah yang tergolong ke dalam kelas risiko rendah sebanyak 3 kapanewon yaitu Girisubo, Rongkop, Tepus, dan kelas risiko sedang sebanyak 2 yaitu kapanewon Panggang dan Saptosari. dan kelas risiko tinggi sebanyak 13 kapanewon yaitu Gedangsari, Karangmojo, Ngawen, Nglipar, Paliyan, Patuk, Playen, Ponjong, Purwosari, Semanu, Semin, Tanjungsari dan Wonosari.

Gambar 2.7
Peta Risiko Gempa Bumi di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

4. **Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi**
Berdasarkan analisis risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi secara umum Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh kelas risiko sedang dengan luasan daerah berisiko sedang adalah 1347,03 ha. Kelas risiko rendah memiliki luasan sebesar 177,03 ha. Jumlah wilayah yang tergolong ke dalam kelas risiko rendah sebanyak 2 kapanewon yaitu Kapanewon Girisubo dan Panggang

Gambar 2.8
Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

5. **Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**
Analisis bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan menghasilkan luas daerah bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Gunungkidul. Total luas yang memiliki potensi bahaya

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Gunungkidul mencapai 37.618,11 Ha atau sekitar 25% dari total luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon Panggang memiliki wilayah bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan terluas dibandingkan dengan kapanewon lainnya dengan luas bahaya 5.778,09 Ha, sedangkan Kapanewon Wonosari memiliki luas bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan terkecil dengan luasan hanya 2,43 Ha.

Gambar 2.9
Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan
di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

6. Bencana Kekeringan

Analisis bahaya kekeringan menghasilkan luas bahaya kekeringan dan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Gunungkidul. Total luas yang memiliki potensi bahaya kekeringan di Kabupaten Gunungkidul mencapai 147.420,29 Ha atau sama sebesar 100% dari total luas wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kapanewon Playen memiliki wilayah bahaya kekeringan terluas dibandingkan dengan kapanewon lainnya dengan luas bahaya 10.724,36 Ha, sedangkan Kapanewon Ngawen memiliki luas bahaya kekeringan terkecil dengan luas 5.025,47 Ha. Kelas bahaya kekeringan sedang yaitu Kapanewon Purwosari.

Gambar 2.10
Peta Risiko Kekeringan di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

- Bencana Tanah Longsor**
Berdasarkan analisis risiko bencana tanah longsor secara umum Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh kelas risiko rendah dengan luasan daerah berisiko rendah adalah 33.218,55 ha. Kelas risiko sedang memiliki luasan sebesar 7.843,41 ha. Sedangkan kelas risiko tinggi memiliki uasan 6,57 ha. Jumlah wilayah yang tergolong ke dalam kelas risiko rendah sebanyak 12 kapanewon dan kelas risiko sedang sebanyak 6 kapanewon. Kapanewon Girisubo memiliki wilayah bahaya tanah longsor terluas dibandingkan dengan kapanewon lainnya dengan luas bahaya 5.745,33 Ha, sedangkan Kapanewon Wonosari memiliki luas bahaya tanah longsor terkecil dengan luas 64,35 Ha

Gambar 2.11
Peta Risiko Tanah Longsor di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

8. Bencana Tsunami

Berdasarkan analisis risiko bencana tsunami secara umum Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh kelas risiko sedang dengan luasan daerah berisiko sedang adalah 275,26 ha. Kelas risiko rendah memiliki luasan sebesar 58,59 ha. Sedangkan kelas risiko tinggi memiliki luasan 2,73 ha. Tidak semua kapanewon memiliki bahaya tsunami, dari 18 kapanewon hanya 6 kapanewon yang terdapat bahaya tsunami. Kapanewon Tepus memiliki wilayah bahaya tsunami terluas dibandingkan dengan kapanewon lainnya dengan luas bahaya 130,56 Ha, sedangkan Kapanewon Purwosari memiliki luas bahaya tsunami terkecil dengan luas 25,15 Ha .

Gambar 2.12
Peta Risiko Tsunami di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

9. Bencana Epidemik dan Wabah Penyakit

Berdasarkan analisis risiko bencana epidemik dan wabah penyakit secara umum Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh kelas risiko rendah dengan luasan daerah adalah 146.635,24 ha maka Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kelas risiko epidemik dan wabah penyakit rendah. Jumlah wilayah yang tergolong ke dalam kelas risiko rendah sebanyak 18 kapanewon.

Gambar 2.13
Peta Risiko Epidemi dan Wabah Penyakit di Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

Tabel 2.5

Kelas Risiko Bencana di Kabupaten Gunungkidul

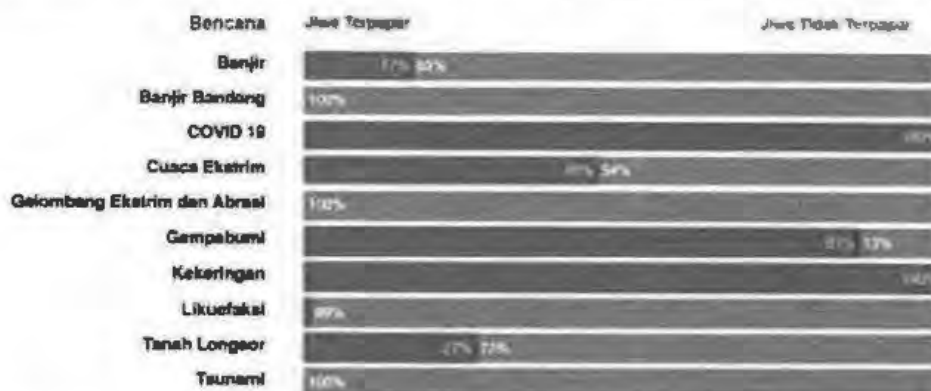
No	Kapanewon	Bencana									Epidemi dan wabah penyakit
		Banjir	Cuaca Ekstrem	Gempa bumi	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor	Tsunami		
1	Gedangsari	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	
2	Girisubo	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	-	Rendah	
3	Karangmojo	Sedang	Sedang	Tinggi	-	Sedang	Tinggi	Rendah	-	Rendah	
4	Ngawen	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Tinggi	Sedang	-	Rendah	
5	Nglipar	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Tinggi	Sedang	-	Rendah	
6	Paliyan	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Sedang	Tinggi	Rendah	-	Rendah	
7	Panggang	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	
8	Patuk	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Tinggi	Sedang	-	Rendah	
9	Playen	Sedang	Sedang	Tinggi	-	Sedang	Tinggi	Rendah	-	Rendah	
10	Ponjong	-	Sedang	Sedang	-	Sedang	Tinggi	Sedang	-	Rendah	
11	Purwosari	-	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah	-	Rendah	
12	Rongkop	-	Sedang	Rendah	-	Sedang	Tinggi	Rendah	-	Rendah	
13	Saptosari	-	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	
14	Semanu	Tinggi	Sedang	Tinggi	-	Sedang	Tinggi	Rendah	-	Rendah	
15	Semin	Sedang	Sedang	Sedang	-	Sedang	Tinggi	Sedang	-	Rendah	
16	Tanjungsari	-	Sedang	Sedang	Sedang	-	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	
17	Tepus	-	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Rendah	
18	Wonosari	Sedang	Sedang	Sedang	-	-	Tinggi	Rendah	-	Rendah	

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana, hasil analisis menunjukkan komponen risiko dan kecenderungan bencana menunjukkan bahwa bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan dan gempabumi menjadi bencana yang menjadi prioritas bencana yang segera ditangani. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi dan epidemi dan wabah penyakit menjadi prioritas kedua dalam penanganan, sedangkan bencana kebakaran hutan dan lahan dan tsunami merupakan bencana prioritas ketiga dalam penanganan bencana di Kabupaten Gunungkidul.

Kapasitas sumberdaya penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Gunungkidul jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Gunungkidul yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Berdasarkan laman <https://inarisk.bnpb.go.id/>, Kabupaten Gunungkidul memiliki ancaman bencana, baik bencana alam maupun non alam.

Gambar 2.14
Perbandingan Jiwa Terpapar dan Jiwa Tidak Terpapar Akibat Bencana di Kabupaten Gunungkidul (<https://inarisk.bnpb.go.id/>)



Potensi bencana yang diprioritaskan untuk ditangani merupakan bahaya yang memiliki risiko kelas tinggi dan memiliki kecenderungan kejadian bencana meningkat setiap tahunnya. Kajian Risiko Bencana yang telah dilakukan di Kabupaten Gunungkidul menghasilkan kelas risiko bencana tinggi dan sedang.

Analisis prioritas penanganan bencana berdasarkan kelas risiko bencana dan kecenderungan kejadian disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 2.6

Matriks Prioritas Penanganan Bencana Kabupaten Gunungkidul

Prioritas Penanganan		Tingkat Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
Kecenderungan Kejadian	Menurun		Tsunami, Kebakaran Hutan dan Lahan	
	Tetap		Gelombang Ekstrem dan Abrasi	
	Meningkat	Epidemi dan Wabah Penyakit	Tanah Longsor, Cuaca Ekstrem	Banjir, Kekeringan, Gempabumi

Sumber : Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Gunungkidul 2022-2026

Keterangan:

- Prioritas Pertama; dapat dilaksanakan pada periode tahun I -III
- Prioritas Kedua; dapat dilaksanakan pada periode tahun II - IV
- Prioritas Ketiga; dapat dilaksanakan pada periode tahun III - IV

Bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam.

Dampak negatif terjadinya bencana antara lain:

- 1) rusaknya infrastruktur di daerah terdampak;
- 2) terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat;
- 3) rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian;
- 4) munculnya berbagai penyakit;
- 5) korban jiwa, cedera, cacat;
- 6) menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak;

serta bisa menambah tingkat kemiskinan di daerah bencana tersebut.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Kabupaten Gunungkidul untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal, Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan berbagai upaya di bidang penanggulangan bencana periode 2021-2024 yang meliputi kegiatan di bidang prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana saat pra bencana atau pengurangan risiko bencana adalah tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan pada pra-bencana, mencakup situasi tidak ada potensi bencana dan situasi terdapat potensi bencana. Pengurangan risiko bencana didasarkan pada pengelolaan terhadap upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana. Oleh karena itu upaya pengurangan risiko bencana difokuskan pada penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh melalui intervensi terhadap faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas.

Sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut berasal dari para pihak dari organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha di Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan utama yang telah dilakukan antara lain:

- a. Tersusunnya Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
- b. Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
- c. Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB),
- d. Tersusunnya Dokumen Rencana Penanganan Risiko Bencana Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan (SRS Pansela)
- e. Tersusunnya dokumen rencana kontijensi (Renkon) per jenis bencana
- f. Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana di daerah rawan bencana
- g. Terselenggaranya penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di 89 kalurahan dari 144 kalurahan di Kabupaten Gunungkidul
- h. Terselenggaranya penguatan kapasitas untuk pencegahan dan kesiapsiagaan di lingkungan sekolah dengan membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
- i. Terselenggaranya gladi kesiapsiagaan, pelatihan relawan, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur penanggulangan bencana
- j. Terselenggaranya musyawarah Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) tingkat kabupaten



- k. Memaksimalkan wilayah rawan bencana yang terpasang *early warning system* (ews) dan rambu jalur evakuasi serta papan informasi bencana.

2. Pelayanan Penanganan Saat/Tanggap Darurat

Pada saat bencana upaya penanggulangan bencana menekankan pada faktor-faktor pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada situasi krisis/darurat bencana.

Penanganan darurat bencana mencakup kebijakan dan strategi penanganan bencana pada fase kedaruratan yakni; siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Tujuannya adalah menangani situasi darurat bencana dengan segera secara terencana, terkoordinasi, terpadu, dan menyeluruh.

Prioritas penyelenggaraan penanganan darurat adalah tindakan-tindakan efektif untuk mengatasi masa krisis dan masa tanggap darurat bencana yang mencakup membangun masyarakat dalam respons mandiri, dan membangun kesatuan mekanisme, prosedur dan tindakan dalam operasi penanganan tanggap darurat bencana.

Secara umum kegiatan pada fase tanggap darurat bencana adalah kegiatan dalam rangka penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana vital untuk aktivitas masyarakat.

Pelaku pada saat terjadi bencana melibatkan semua pihak termasuk dukungan dari pemerintah pusat, TNI/POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan kemampuan masing-masing. Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat dan bantuan darurat melalui kegiatan:

- a. Pengembangan Pusdalops tanggap darurat dalam melaksanakan, menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana
- b. Posko Siaga dan Tanggap Darurat Bencana
Posko dilakukan melalui sistem piket petugas selama 24jam/7hari selama 1 tahun penuh untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan pelaporan kejadian bencana.
- c. Tanggap darurat (*response*), kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Kegiatan ini meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana prasarana, antara lain :
 - pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya
 - penentuan status keadaan darurat bencana
 - penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
 - pemenuhan kebutuhan dasar
 - perlindungan terhadap kelompok rentan
 - pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
- d. Bantuan Darurat (*relief*), merupakan kegiatan pemberian bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.
- e. Penyediaan logistik permakanaan dan logistik peralatan bagi korban bencana

3. Pelayanan Pasca Bencana

Merupakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana dengan penekanan pada faktor-faktor yang dapat mengembalikan dan membangun kembali kondisi masyarakat, pemerintah, dunia usaha, lingkungan hidup yang terdampak kejadian bencana. Tujuannya adalah memfungsikan dan membangun kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan menekankan pada faktor-faktor dan sumber daya yang mempercepat proses pemulihan.

Penyelenggaraan pemulihan pasca bencana meliputi serangkaian tindakan penyusunan rencana dan penentuan prioritas pemulihan, pengalokasian sumber daya dan dana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut harus disusun, ditetapkan, dan dilaksanakan berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (jitupasna), mempertimbangkan proses, hasil, manfaat, dan dampak dari program-kegiatan pemulihan.

Meliputi:

- Koordinasi teknis penanggulangan bencana untuk penanganan banjir, kekeringan, kebakaran, dan tanah longsor yang merupakan bencana yang rutin/musiman terjadi di Kabupaten Gunungkidul.
- Memaksimalkan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana
- Sinergi penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Gunungkidul
- Pemberian stimulan bagi korban bencana

Sedangkan untuk mengetahui tingkat risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul, dengan berdasarkan pada data/dokumen pendukung yang dihimpun BPBD Kabupaten Gunungkidul maka akan diketahui nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Gunungkidul dalam hubungannya dengan besarnya risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul.

1. Indeks Risiko Bencana

Penentuan tingkat risiko bencana dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2008. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Di mana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (*magnitude*) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya. *vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Komponen *capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana;
- (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

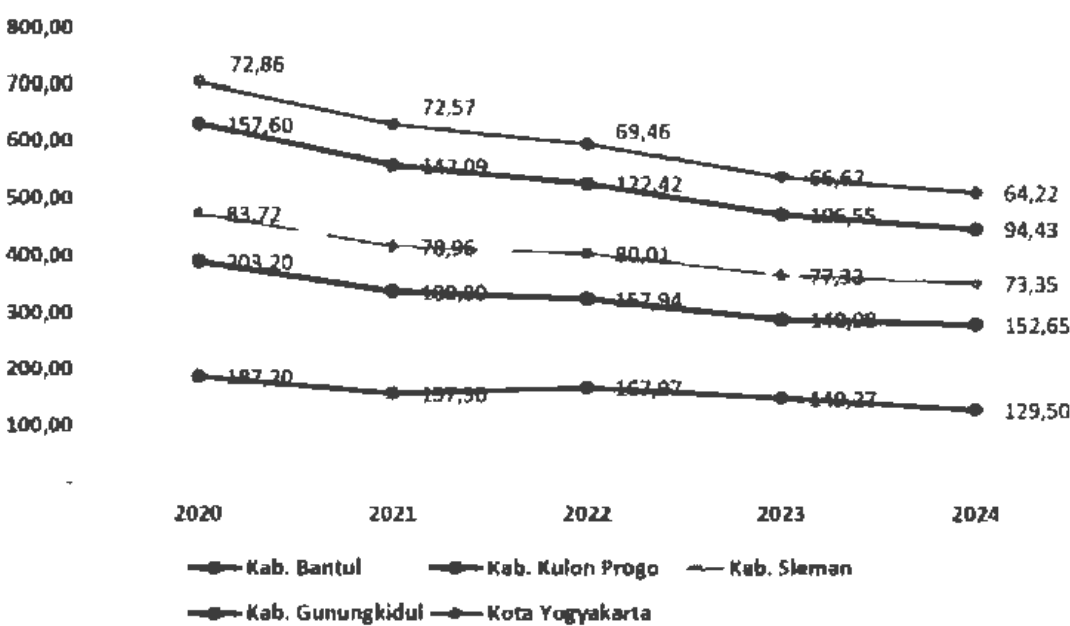
Tabel 2.7.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi DIY

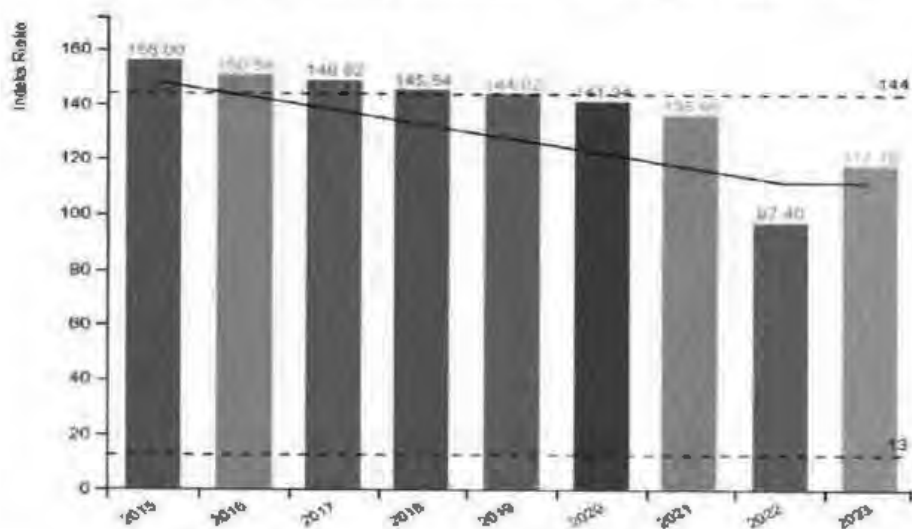
No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kab. Bantul	187.20	157.30	167.97	149.27	129,5
2	Kab. Kulon Progo	203.20	180.80	157.94	140.98	152,65
3	Kab. Sleman	83.72	78.96	80.01	77.33	73,35
5	Kota Yogyakarta	72.86	72.57	69.46	66.62	64,22

Gambar 2.15.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi DIY



Gambar 2.16.
Indeks Risiko Bencana Rata-Rata Nasional



Tabel 2.8
Perbandingan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul di
Banding Rata-Rata Nasional

Keterangan	2022	2023	2024
Kabupaten Gunungkidul	122,42	106.55	94,43
Rata-Rata Nasional	97,40	117,78	Proses

2. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Hasil penilaian ketahanan daerah kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan indeks resiko bencana. Terdapat 71 (tujuh puluh satu) indikator yang telah disepakati dalam mewujudkan kabupaten tangguh bencana yang herkorrelasi dalam penurunan indeks resiko bencana.

Tabel 2.9
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2022 - 2024

No.	Prioritas	Indeks Prioritas			Indeks Kapasitas Daerah		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,90	0,95	0,94	0,66	0,73	0,77
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1,00	1,00	1,00			
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,65	0,77	0,79			
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,90	0,90	1,00			
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,55	0,67	0,71			

No.	Prioritas	Indeks Prioritas			Indeks Kapasitas Daerah		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,48	0,58	0,69			
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,84	0,84	0,71			

Tabel 2.10
 Nilai IKD Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2022 - 2024

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Indikator Kinerja PB	2022	2023	2024	Kelas
2	Kab. Sleman	IKD	0,60	0,70	0,77	Sedang
3	Kab. Bantul	IKD	0,50	0,58	0,72	Sedang
4	Kota Yogyakarta	IKD	0,62	0,68	0,69	Sedang
5	Kab. Kulonprogo	IKD	0,63	0,65	0,64	Sedang

BPBD Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui berbagai kegiatan, seperti sosialisasi, edukasi, dan penanggulangan bencana, yang berkontribusi pada tujuan SDGs yang relevan.

Tabel 2.11
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDG'S)

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Angka Dasar (Baseline)	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN								
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	1,17; 0; 1,43	5.229,93	17.047,63	3.697,83	0,25; 0; 102,8	0; 0; 122,6
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	1	2	8	6	5	1
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	BPBD	1	4	3	5	1	1
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	3.014.650.000	2.317.900.000	1.403.050.000	12.011.050.000	5.093.400.000	4.498.883.000
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	2	1	1	1	1	1
TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN								
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.								

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Angka Dasar (Baseline)	Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	1,17; 0; 1,43	5.229,93	17.047,63	3.697,83	0,25; 0; 102,8	0; 0; 122,6
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	n/a	111,03	116,8	78,66	69,38	60,83
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	31	30	30	30	30	30
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	3.014.650.000	2.317.900.000	1.403.050.000	12.011.050.000	5.093.400.000	4.498.883.000
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertuan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	2	1	1	1	1	1
TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA								
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	2	1	1	1	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	1,17; 0; 1,43	5.229,93	17.047,63	3.697,83	0,25; 0; 102,8	0; 0; 122,6

Selain capaian tersebut diatas, BPBD Kabupaten Gunungkidul juga mengampu Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang dikeluarkan oleh Kemendagri mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. BPBD Kabupaten Gunungkidul mengampu 2 SPM yaitu SPM Sub Urusan Bencana dan SPM Sub Urusan Kebakaran.

Penerima pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana dan sub urusan kebakaran adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar, termasuk pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dan pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2.12
Capaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun ke			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	80	91,6	91,68
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban bencan	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	73,66	97,22	96,75

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai AKIP BPBD				81,50	82,00	82,50	83,00	83,50	82,25	82,35	83,61			100,92	100,43	101,35		
2	Presentase dukungan tata ruang keistimewaan terhadap penanggulangan bencana				0	25	50	75	100	0	25	0			0	100	0		
3	Presentase kejadian bencana/kebakaran tertangani				100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	100		
4	Presentase masyarakat kalurahan memiliki kemampuan manajemen bencana meningkat				51,39	54,86	58,33	61,81	65,28	56,94	60,41	61,11			110,80	110,12	104,77		

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul

Uraian	Target Rencstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penanggulangan Bencana (Pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana)	1.144.885.000	1.330.600.000	1.371.600.000	1.452.600.000	1.472.600.000	1.396.923.421	1.802.802.662	1.772.305.786	N/A	N/A	1,22	1,35	1,29	N/A	N/A	1.354.457.000	1.637.343.956
Penanganan kejadian kebakaran	580.800.000	658.000.000	695.000.000	753.400.000	747.500.000	578.915.000	752.958.348	787.503.282	N/A	N/A	1,00	1,14	1,13	N/A	N/A	686.940.000	706.458.877

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

a. Penanggulangan bencana sebagai isu global

Penanggulangan bencana merupakan isu internasional sejalan dengan isu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu pengelolaan lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi perhatian banyak kalangan terutama pada saat darurat. Sementara itu paradigma penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko bencana dilakukan sejak dini (sejak tidak ada bencana), maka sasaran yang diharapkan adalah bahwa ketika terjadi bencana maka dampak negatifnya sangat kecil baik aspek kerugian, kerusakan harta benda, dan infrastruktur maupun korban jiwa manusia.

b. Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana

Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, ditambah lagi dengan kondisi kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan risiko bencana. Oleh sebab itu perlu adanya dukungan dan penyadaran kepada masyarakat sehingga dapat hidup dengan harmonis dengan bencana. Artinya masyarakat mampu mengenali tanda bahaya sehingga jika potensi bencana meningkat masyarakat dapat segera mengungsi. Namun jika ada upaya relokasi ke wilayah yang lebih aman adalah pilihan yang lebih baik, maka hal ini akan sangat berharga menjadi investasi yang lebih baik bagi masyarakat, karena keamanan dan kenyamanan menjadi lebih terjamin.

c. Kesiapsiagaan para pemangku kepentingan PB

Meningkatnya intensitas dan frekuensi bencana di Kabupaten Gunungkidul perlu dipersiapkan aparat yang tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu perlu penambahan kapasitas dari aparatur dan relawan penanggulangan bencana. Serta penambahan kapasitas tingkat administrator dalam memperdalam wawasan dan upaya penanganan bencana di Kabupaten Gunungkidul sehingga terbentuklah satu tujuan dalam upaya pemenuhan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Gunungkidul, perlu adanya upaya dengan penambahan kapasitas baik pada manusianya, regulasinya, kajiannya, wilayah rawannya, upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaannya, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencananya serta pengembangan sistem pemulihan bencana.

d. Dokumentasi dan legalisasi penyelenggaraan PB

Sebagai urusan bersama, penanggulangan bencana dilakukan oleh banyak pihak baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota), masyarakat dan dunia usaha. Upaya-upaya tersebut seringkali tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam PB. Praktik-praktik yang baik yang dilakukan dalam penanggulangan bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat. Keterpaduan antara standar pelayanan dalam penanggulangan bencana yang disesuaikan dengan faktor budaya masyarakat seringkali tidak terdokumentasi sehingga tidak ada pembelajaran yang berkelanjutan.

Aspek dokumentasi selain praktik penanggulangan bencana adalah dokumentasi terkait data dan informasi bencana. Data

dan informasi bencana perlu dikelola dengan baik untuk menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bersama. Pembentukan pusat informasi bencana (*mini command center*) oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu menjadi pusat data dan informasi (Pusdatin) bencana dan menjadi salah satu solusi untuk menjembatani kebutuhan informasi dan publikasi baik secara formal maupun non formal bagi seluruh pemangku kepentingan. Hal ini merupakan salah satu implementasi undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan BPBD bahwa tugas dan fungsi Sekretariat BPBD adalah melaksanakan pengumpulan data dan informasi bencana di wilayahnya. Pusat data dan informasi bencana difungsikan sebagai pengumpulan data dan informasi kejadian dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

e. Bencana tidak mengenal batas wilayah administratif

Bencana dapat terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai faktor yang mempengaruhi baik alam, non alam maupun sosial. Seringkali bencana yang terjadi di suatu daerah berdampak pada daerah lain disekitarnya dan berbeda secara administratif. Oleh sebab itu kerjasama penanganan bencana dan masyarakat yang terdampak bencana di daerah perbatasan perlu terus digalang dan dikoordinasikan oleh para pemangku kepentingan PB. Pelaksanaan dan sinergi program dan kegiatan PB antar pemangku kepentingan harus didorong secara aktif agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat terutama yang menempati daerah rawan bencana. Sinkronisasi dan sinergi program kegiatan harus dilaksanakan sejak awal dalam hal keterpaduan.

2. Peluang

Sejak diterbitkannya UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan dibentuknya BNPB di tingkat pusat dan BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul secara otomatis melekat pada BPBD Kabupaten Gunungkidul. Terbitnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang pembentukan SOTK akan membawa perbaikan dalam pengelolaan bencana di daerah.

BPBD Kabupaten Gunungkidul mempunyai 3 (tiga) fungsi utama PB yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Gunungkidul memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai *leading* sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPUKPR, DPTR, Dinas Pendidikan, dan Perangkat Daerah teknis lainnya. BPBD Kabupaten Gunungkidul mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif

dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai *incident commander*, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Perubahan iklim merupakan suatu isu lintas-sektoral, dan membutuhkan koordinasi antar dan intra-sektoral, oleh karena itu peningkatan kerja sama dan koordinasi antara lingkungan, ekonomi, pembangunan, energi, pertanian, perikanan, peternakan dan sektor kehutanan merupakan hal yang sangat penting. Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan dalam menghindari dampak merugikan dari perubahan iklim. Dengan prakarsa ini, diharapkan bahwa strategi regional dalam adaptasi dan mitigasi dikembangkan dan disiapkan untuk mengantisipasi ancaman terhadap ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim.

Peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Terbitnya UU no 24 tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah, peluang untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana sangat luas, tidak hanya terbatas pada pemerintah, namun juga dari masyarakat dan dunia usaha;
- b. Terbitnya UU No 23 tahun 2014 beserta peraturan pemerintah pendukungnya berdampak pada penguatan peran BPBD Kabupaten Gunungkidul;
- c. Adanya teknologi pemetaan memungkinkan untuk identifikasi dan inventarisasi /pendataan secara lebih efektif dan efisien
- d. Pendanaan dari sektor non pemerintah baik masyarakat maupun lembaga usaha masih sangat terbuka dan banyak
- e. Dibangunnya sistem penanggulangan bencana secara nasional memungkinkan BPBD Kabupaten Gunungkidul mempunyai kompetensi dan kapasitas yang sama dan sesuai standar kualifikasi
- f. Peluang pengembangan kapasitas diri melalui pendidikan formal.
- g. Pengembangan kapasitas lembaga BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional.
- h. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana sebesar sekian persen (1%) dari APBD perlu diatur melalui peraturan yang mengikat
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dapat dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan , kursus , dll
- j. Penyusunan aplikasi, sistem informasi untuk menyimpan, dan mengelola data kebencanaan, baik kerawanan, kerentanan, kapasitas PB secara baik

- k. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana dan diuji melalui gladi lapang bencana secara periodik.
- l. Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat (warga negara) terhadap bencana, mulai dari tahap prabencana, masa tanggap darurat, sampai pada tahap pascabencana. Adapun kelompok sasaran layanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah masyarakat (warga negara) yang berada di wilayah Kabupaten Gunungkidul serta seluruh *stakeholder* terkait dengan penanganan kebencanaan.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul adalah masyarakat heterogen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti : profesi, agama, adat istiadat dan sebagainya. Meskipun berbeda-beda namun mereka tetap hidup berdampingan secara damai menjunjung tinggi toleransi dan menumbuhkembangkan sifat kegotongroyongan. Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul pada umumnya bersifat tradisional, hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, yang umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial ekonomi, sehingga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam menyikapi dan mengatasi bencana dan mudah diterpa isu-isu negatif. Hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara cepat, tepat, terencana dan terpadu dalam memaksimalkan semua potensi yang ada.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Data Hasil Konsolidasi & Pembersihan Semester II tahun 2024 yang dikeluarkan Ditjend Dukcapil Kementrian Dalam Negeri, 31 Desember 2024 adalah sebesar 776.926 jiwa, yang terdiri dari 384.854 jiwa berjenis laki-laki dan 392.072 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Keberadaan BPBD secara kontekstual memegang posisi yang cukup penting karena menangani segala urusan yang menyangkut pada keselamatan jiwa dan kerugian harta benda akibat terkena bencana. Sebagai sebuah unit kerja yang diharapkan akan memiliki sifat peduli, cepat, sigap adil dan benar sesuai dengan amanat aturan perundang-undangan. Sehingga kehidupan masyarakat akan merasa tenang dan aman dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tabel 2.15
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul
terhadap Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi & Misi	Program Bupati – Wakil Bupati	Arahan RTRW	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
Visi : * Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" Misi :Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia	Alam Lestari: Meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, pelestarian kawasan lindung, perbaikan manajemen sampah, dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana.	Arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam a. mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana c. mengembangkan kawasan permukiman baik permukiman perdesaan maupun kawasan permukiman perkotaan untuk tempat bermukim yang sehat, asri dan aman dari bencana alam serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana	a. penetapan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata; b. penetapan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana; d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana; e. pelaksanaan penyelenggaraan	a. Belum optimalnya upaya penanggulangan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi yang memerlukan peran pentahelix. b. Regulasi penanggulangan bencana masih menggunakan regulasi lama dan belum diperbaharui c. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana masih menggunakan dokumen lama dan belum diperbaharui. d. Kondisi topografis dan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul menghambat proses penanganan penanggulangan bencana e. Pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan sistem peringatan dini masih rendah f. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana belum optimal	1. Adanya dokumen RTRW yang memuat /mengidentifikasi daerah rawan bencana alam dan arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam. 2. Adanya dokumen Kajian Risiko Bencana 3. Adanya peta rawan banjir. 4. Adanya regulasi yang kuat tentang Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Daerah yang memperkuat peran dan fungsi BPBD 5. Memiliki Struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas Penanggulangan Bencana dari tahap Mitigas sampai rehabilitasi	1. Dalam pembangunan di daerah belum sepenuhnya berpedoman dokumen RTRW dan kajian risiko bencana. 2. Keterbatasan anggaran, 3. karakteristik geografis khusus Gunungkidul, Wilayah perbukitan dan gua-gua karst menyulitkan akses mobilisasi evakuasi saat terjadi bencana seperti tanah longsor dan kekeringan. 4. Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai potensi dan

Visi & Misi	Program Bupati – Wakil Bupati	Arahan RTRW	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		berbasis pada pencegahan dan mitigasi bencana	penanggulangan bencana;	g. Keterbatasan sumberdaya penanggulangan bencana h. Koordinasi dan komando penanggulangan bencana belum dilakukan sesuai kewenangannya. i. Pemanfaatan teknologi sistem informasi penanggulangan bencana belum optimal j. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum optimal k. Sistem manajemen penanggulangan kebakaran dan penyelamatan belum optimal	6. Keberadaan Pusdalops sebagai pusat informasi dan koordinasi penanggulangan bencana yang sudah dilengkapi perangkat teknologi pemantauan. 7. Tersedianya sarana logistik, kendaraan operasional, serta peralatan evakuasi yang memadai 8. Sudah terbentuknya Kalurahan Tangguh Bencana sampai tahun 2025 sebesar 90 Kalurahan 9. Penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan kepada relawan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	mitigasi risiko bencana. 5. Pembentukan Kalurahan Tangguh Bencana belum menjangkau seluruh wilayah rawan bencana

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis penanggulangan bencana dirumuskan sebagai permasalahan yang telah teridentifikasi dan diprediksi akan terjadi dalam jangka menengah ke depan. Isu strategis yang dirumuskan juga meliputi tantangan dan peluang dalam konteks penanggulangan bencana maupun pembangunan secara umum yang perlu direspon melalui kebijakan dan strategi serta rencana aksi pada 5 (lima) tahun ke depan.

Sebelum disusunnya konsep skenario penanggulangan bencana, perlu adanya suatu pengembangan penanganan strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi yang ada, serta pertimbangan yang lain yaitu terhadap tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Prioritas yang dikembangkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana adalah :

- a. Strategi perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel;
- b. Strategi peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana;
- c. Strategi penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif, terkoordinir dan /terpadu;
- d. Strategi pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka di Kabupaten Gunungkidul yang menjadi dasar perumusan penanggulangan bencana mempertimbangkan:

- a. Prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- b. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Anggaran yang disediakan dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. Koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana secara lintas sektoral; dan
- e. Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dari data yang ada, jumlah kejadian bencana mengalami kenaikan, baik jumlah kejadian maupun korban bencana. Dengan tingginya resiko bencana dan masih belum optimalnya capaian kinerja dalam menanggulangi bencana daerah, maka Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu memiliki system penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan tetap menghargai budaya lokal, membangun kemitraan publik dan swasta, mendorong kesetiakawanan dan kedermawanan, serta menciptakan perdamaian dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Paradigma penanggulangan bencana yang bersifat reaktif, tanggap darurat, sentralisasi, dan hanya menganggapnya sebagai tanggungjawab Pemerintah perlu diubah ke paradigma baru yaitu preventif terencana, pengurangan resiko, desentralisasi, dan urusan bersama. Faktor kerentanan perlu direspon dengan pengembangan kemandirian sosial ekonomi masyarakat dalam kerangka antisipasi dan pengurangan resiko bencana secara terencana.

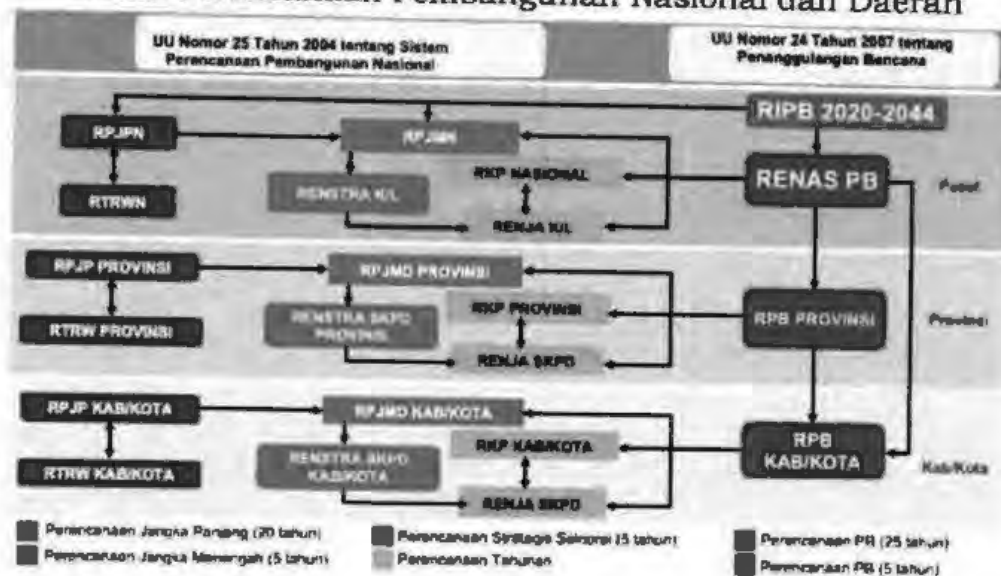
1. Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Dan Renstra Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu strategis, dilakukan pemetaan terhadap isu-isu penanggulangan bencana secara global, nasional, provinsi. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mengacu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran.

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan BNPB Nomor 1 Tahun 2025. Seperti tertuang dalam Pasal 3 Peraturan BNPB tersebut, bahwa fokus capaian 2025-2029 pada Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2044 antara lain :

- a. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
- b. terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
- c. terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman;
- d. terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
- e. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
- f. terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
- g. terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
- h. terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat;
- i. terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
- j. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan;
- k. terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana; dan
- l. terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana.

Gambar 2.17
Posisi Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB)
dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah



2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan Perda no 6 tahun 2011 tentang RTRW bahwa secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana salah satunya dengan mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana berbasis pada pencegahan dan mitigasi bencana. Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*). Selain itu diharapkan pula mampu menyinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap. Hal ini dalam rangka pemenuhan peraturan turunan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, serta pengaturan peran serta lembaga internasional maupun asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana. Sehingga harapan dari keseluruhan kegiatan dimaksud adalah dapat bermuara kepada pemenuhan hak dasar masyarakat Indonesia yang lebih waspada guna melaksanakan kehidupan yang layak dan berkelanjutan serta dalam rangka upaya mendukung pembangunan menuju Indonesia sejahtera, demokratis, dan berkeadilan.

Dalam hubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, BPBD Kabupaten Gunungkidul maka dianalisa beberapa faktor pendukung dengan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang mungkin timbul antara lain:

- a. tersedianya dokumen yang terintegrasi dalam rangka penanggulangan bencana;
- b. terjadinya peningkatan intensitas bencana di Kabupaten Gunungkidul;
- c. tidak seimbangnya perbandingan antara luas wilayah dengan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
- d. kondisi permukiman penduduk yang masih menempati daerah rawan bencana (tanah longsor-kekeringan) dikarenakan permasalahan ekonomi;
- e. kondisi geologis Kabupaten Gunungkidul yang terbentuk dari batu kapur (*karst*) yang mempunyai sifat aliran sungai bawah tanah dan curah hujan yang kurang berdampak pada kekeringan di beberapa wilayah; dan
- f. pemberian stimulan bantuan terhadap korban bencana justru mengurangi tingkat kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana

Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis dalam pencapaian TPB KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul adalah Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim, Isu ini terkait dengan beberapa kondisi yaitu Ancaman peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim dan Belum optimalnya pengendalian degradasi lahan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

3. Implikasi RTRW bagi Pelayanan OPD

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario penanggulangan Bencana Kabupaten Gunungkidul diimplikasikan adalah dengan asumsi sebagai berikut.

- 1) Pembagian struktur penanganan bencana.
- 2) Pembagian wilayah penanganan bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada.
- 3) Penanganan sistem informasi kebencanaan yang terpusat di BPBD Kabupaten.

Dalam hal ini kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu:

- 1) Penanganan bencana bisa tersebar sampai kepada kelompok masyarakat terkecil
- 2) Adanya standar operasional prosedur penanggulangan bencana
- 3) Sistem informasi yang terkoneksi ke seluruh wilayah rawan bencana
- 4) Koordinasi lintas sektoral yang efektif dalam penanggulangan bencana
- 5) Sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai

Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi. Seluruh elemen masyarakat umum dan jajaran pemerintahan perlu mengubah paradigma penanggulangan bencana dari respons menjadi pencegahan (*prevention*).

Tabel 2.16
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	Permasalahan BPBD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan BPBD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan BPBD			Isu Strategis BPBD Gunungkidul 2026-2029
			Global	Nasional	Regional	
Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penanggulangan Bencana.	a. Belum optimalnya upaya penanggulangan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi yang memerlukan peran pentahelix. b. Regulasi penanggulangan bencana masih menggunakan regulasi lama dan belum diperbaharui c. Dokumen perencanaan penanggulangan bencana masih menggunakan dokumen lama dan belum diperbaharui. d. Kondisi topografis dan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul menghambat proses penanganan penanggulangan bencana	Ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup, peningkatan risiko bencana dan peningkatan kerentanan perubahan iklim Permasalahan RPJMD : Belum terwujudnya kabupaten yang berwawasan lingkungan Isu Strategis RPJMD: Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim	7 (tujuh) target global (<i>Sendai Framework for Disaster Risk Reduction /SFDRR</i>) 2015-2030: 1. Pengurangan yang berarti dalam angka kematian akibat bencana di dunia. 2. Pengurangan yang berarti dalam jumlah masyarakat terdampak. 3. Pengurangan kerugian ekonomi secara langsung dalam kaitannya dengan GDP dunia. 4. Pengurangan yang berarti dalam kerusakan	Isu Strategis BNPB: 3. Meningkatnya Potensi Dampak dan Risiko Bencana Geologi Subduksi selatan Jawa menunjukkan tiga lokasi <i>seismic gap</i> yang berpotensi memicu gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 9 atau lebih, berpotensi menimbulkan tsunami. Ancaman tsunami tinggi tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Indonesia, dengan proyeksi kenaikan jumlah populasi terdampak dan potensi kerugian fisik, ekonomi, serta kerusakan lingkungan meningkat dari 2015 hingga 2045. Selain itu, erupsi gunungapi di Indonesia juga memiliki dampak global dengan 70 gunungapi perlu mendapat perhatian khusus. 4. Meningkatnya Risiko dan Potensi Dampak Bencana Akibat Perubahan Iklim global, didorong oleh aktivitas	Isu Strategis BPBD DIY 2022-2027: 1. Pengelolaan Risiko bencana menjadi arus utama dalam kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta 2. Peningkatan kapasitas manajemen penyediaan, pengelolaan, distribusi logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana di DIY 3. Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di DIY 4. Optimalisasi sistem komando penanganan darurat bencana di DIY 5. Optimalisasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan di DIY	1. Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi 2. Meningkatnya risiko dan potensi dampak bencana akibat perubahan iklim 3. Meningkatnya kerentanan penyakit yang menyebabkan epidemi dan zoonosis. 4. Kebutuhan transformasi tata kelola penanggulangan bencana dan kolaborasi multi-pihak 5. Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan 6. Optimalisasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Gunungkidul

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	Permasalahan (BPBD)	Isu KEHS Yang Relevan Dengan (BPBD)	Isu Lingkungan Manusia Yang Relevan Dengan BPBD			Isu Strategis BPBD Gunungkidul 2020-2029
			Global	Nasional	Regional	
	e. Pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana dan sistem peringatan dini masih rendah f. Tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana belum optimal g. Keterbatasan sumberdaya penanggulangan bencana h. Koordinasi dan komando penanggulangan bencana belum dilakukan sesuai kewenangannya. i. Pemanfaatan teknologi sistem informasi penanggulangan bencana belum optimal j. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana belum optimal		terhadap infrastruktur penting/kritis dan gangguan pelayanan dasar, termasuk fasilitas kesehatan dan pendidikan. 5. Penambahan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko bencana di tingkat nasional dan tingkat daerah pada tahun 2020. 6. Peningkatan kerja sama internasional untuk mendukung negara-negara berkembang dalam melaksanakan SFDRR. 7. Bertambahnya akses pada sistem peringatan	manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Perubahan iklim juga berdampak pada kesehatan manusia, meningkatkan penyakit yang ditularkan oleh vektor, air, dan makanan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang tidak terkendali menambah kerentanan terhadap bencana. 5. Pertumbuhan Penduduk, Alih Fungsi Lahan, dan Percepatan Perkembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Investasi Alih fungsi lahan di Indonesia, meskipun tren deforestasi menurun, masih mempengaruhi risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Perkembangan pusat pertumbuhan dan kawasan investasi mendorong perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi cepat, memberikan tekanan pada perkotaan dan		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	Permasalahan BPBD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan BPBD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan BPBD			Isu Strategis BPBD Gunungkidul 2026-2029
			Global	Nasional	Regional	
	k. Sistem manajemen penanggulangan kebakaran dan penyelamatan belum optimal		dini multi bencana dan informasi risiko bencana dan pengkajian untuk masyarakat	meningkatkan risiko bencana. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan mempengaruhi ketersediaan permukiman dan infrastruktur, sering menyebabkan urban <i>sprawl</i> dan penurunan kualitas lingkungan. Kawasan industri yang berkembang menghadapi tantangan perencanaan yang memadai untuk menghindari masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. 6. Potensi Kejadian Konflik Sosial Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa, memiliki tantangan besar dalam pengelolaan konflik sosial. Potensi konflik sosial di Indonesia dapat muncul akibat ketimpangan sosial dan ekonomi, isu etnis dan agama, pemanfaatan identitas politik, sengketa atas tanah dan sumber daya alam, migrasi masuk, dan lainnya. 7. Belum Optimalnya Pemantauan, Evaluasi, dan		

POTENSI DAERAH YANG MENYALAI KEWENANGAN	Permasalahan (RP34)	Isu KLHS Yang Relevan Dengan (RP34)	Isu Global	Langkungan Dimensi Yang Relevan Dengan (RP34)		Isu Strategis (RP34) Gunungkidul 2025-2029
				Nasional	Regional	
				Akuntabilitas Bidang Penanggulangan Bencana Pemantauan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di setiap tahapan bencana baik di tingkat pusat maupun daerah penting dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan upaya tersebut dalam pengurangan risiko bencana dan meningkatkan akuntabilitas upaya penanggulangan bencana. 8. Kebutuhan Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana dan Kolaborasi Multi-Pihak Transformasi tata kelola penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal seperti: penguatan kebijakan dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga; pemanfaatan teknologi, informasi, dan inovasi; pemberdayaan masyarakat; dan penguatan pendanaan. 9. Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem		

POTENSI DAERAH YANG MELAKUKAI KEWENANGAN	Permasalahan RPBD	Isu KUES Yang Relevan Dengan RPBD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan RPBD			Isu Strategis RPBD Kabupaten 2025-2029
			Global	Nasional	Regional	
				Informasi Teknologi Kebencanaan Persoalan dan tantangan terkait keterbukaan akses, integrasi data, interoperabilitas data, keamanan dan privasi, standardisasi data (ketersediaan dan kualitas data), serta peningkatan partisipasi para pihak masih dihadapi dan memerlukan solusi dalam jangka menengah ke depan 10. Kebutuhan Penguatan Kepemimpinan dan Peran Strategis Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana di Tingkat Global. Untuk mewujudkan pengembangan pendekatan multipihak termasuk meningkatkan kerja sama internasional dalam pengurangan risiko bencana, di jangka menengah ke depan, penguatan kepemimpinan dan peran strategis Indonesia masih sangat dibutuhkan.		

Dari tabel tersebut diatas, dapat dijelaskan isu strategis BPBD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Meningkatnya potensi dampak dan risiko bencana geologi**
Subduksi selatan Jawa menunjukkan tiga lokasi *seismic gap* yang berpotensi memicu gempa dengan kekuatan hingga magnitudo 9 atau lebih (*megatrust*), berpotensi menimbulkan tsunami. Ancaman tsunami tinggi tersebar di hampir seluruh wilayah pantai Kabupaten Gunungkidul.
2. **Meningkatnya risiko dan potensi dampak bencana akibat perubahan iklim**
Perubahan iklim global, didorong oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penebangan hutan, meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi di Indonesia, termasuk Kabupaten Gunungkidul.
3. **Meningkatnya kerentanan penyakit yang menyebabkan epidemi dan zoonosis.**
Alih fungsi lahan di Kabupaten Gunungkidul, pada akhirnya akan menyebabkan kerentanan ruang terhadap fenomena iklim dan fenomena geologi yang menjadi sebuah ancaman terjadinya sebuah bencana. Tidak hanya iklim dan geologi, pertumbuhan penduduk, meningkatnya aktivitas dan interaksi yang tidak sehat akan menimbulkan kerentanan penyakit yang menyebabkan epidemi dan zoonosis sebagai bencana kesehatan, yang kesemuanya itu akan menjadi gangguan terhadap hasil dan terhentinya proses pembangunan dalam mencapai kesejahteraan sebagai konsep dasar kehidupan manusia
4. **Kebutuhan transformasi tata kelola penanggulangan bencana dan kolaborasi multi-pihak**
Tata kelola penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul masih memiliki persoalan dan tantangan yang dihadapi terutama berkaitan dengan dukungan sistem regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan kolaborasi multipihak. Transformasi tata kelola penanggulangan bencana ke depan dibutuhkan dalam berbagai hal seperti:
 - a. penguatan kebijakan dan regulasi;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. koordinasi antar lembaga;
 - d. pemanfaatan teknologi, informasi, dan inovasi;
 - e. pemberdayaan masyarakat; dan
 - f. penguatan pendanaan.
5. **Pengelolaan Satu Data dan Pemanfaatan Sistem Informasi Teknologi Kebencanaan**
Data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi merupakan komoditas penting dalam tata kelola penanggulangan bencana ke depan.
Indonesia telah mengimplementasikan pemanfaatan dan pengelolaan data terpadu melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga telah menerbitkan regulasi terkait pengelolaan data terpadu kebencanaan melalui Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Satu Data Bencana. Berbagai kebijakan di tingkat nasional dan sistem informasi teknologi juga telah tersedia di tingkat pusat untuk penanggulangan bencana.
Dalam jangka menengah ke depan pengelolaan data terpadu dan pemanfaatan sistem informasi teknologi masih menjadi tantangan

terutama untuk untuk meningkatkan pemahaman risiko bencana dan pengambilan keputusan yang tepat. Persoalan dan tantangan terkait keterbukaan akses, integrasi data, interoperabilitas data, keamanan dan privasi, standardisasi data (ketersediaan dan kualitas data), serta peningkatan partisipasi para pihak masih dihadapi dan memerlukan solusi dalam jangka menengah ke depan.

6. Optimalisasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Gunungkidul

Karakteristik wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cenderung kering menjadikan Kabupaten Gunungkidul menjadi salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sering mengalami kebakaran. Ketersediaan sumberdaya yang masih jauh dari kondisi ideal menyebabkan pelayanan minimal pada urusan kebakaran di Kabupaten Gunungkidul belum tercapai. Waktu tanggap (*response time*) merupakan mutu layanan dasar yang harus diberikan unit layanan kebakaran ketika terjadi kebakaran di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan data Unit Pelayanan Kebakaran Kabupaten Gunungkidul tingkat ketepatan pelayanan penanganan kebakaran adalah 68%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan minimal penanganan kebakaran belum dapat diberikan secara optimal oleh Unit Pelayanan Kebakaran Kabupaten Gunungkidul. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak kebakaran dimaksud wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota sebesar 100% (seratus persen) setiap tahunnya. Dengan kata lain, pemerintah melalui perangkat daerah penyelenggara urusan penanganan kebakaran wajib hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Rekomendasi yang tertuang dalam RISPK antara lain:

- a. Program Pemeriksaan Keandalan Bangunan
- b. Program Penguatan Kelembagaan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat
- d. Program Penegakan Peraturan Terkait Dengan Proteksi Kebakaran
- e. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
- f. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM
- g. Program Pendidikan dan Pelatihan

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH

Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode tertentu, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yang menggambarkan kondisi maupun hasil dari suatu kegiatan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, dimana dalam merumuskan tujuan dan sasaran rencana strategis didasarkan pada rumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 adalah: "**Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban**".

Misi Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Berdasarkan rumusan visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029, BPBD Kabupaten Gunungkidul mengampu misi ke-5 yaitu "Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia". Dengan program strategis "Alam Lestari". Yaitu dengan meningkatkan kualitas pelestarian lingkungan dan ketahanan warga terhadap bencana melalui pengendalian pemanfaatan ruang sesuai regulasi, pelestarian kawasan lindung, perbaikan manajemen sampah, dan perluasan Kalurahan Tangguh Bencana.

Sebagaimana disebutkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029, prioritas, misi, dan sasaran Kabupaten Gunungkidul yang didukung oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kabupaten Gunungkidul

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Lestari	Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (IRB)

3.2 TUJUAN dan SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

3.2.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Penetapan tujuan didasarkan pernyataan visi dan misi serta mengakomodasi isu-isu aktual yang berkembang ke arah perubahan dari analisa strategis. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai di masa datang. Sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh BPBD Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah Meningkatkan ketangguhan daerah dan Masyarakat dalam menghadapi bencana,serta dalam mengurangi risiko bencana dengan indikator tujuan "Persentase Penurunan Indeks Resiko Bencana".

3.2.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran antara lain : spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sasaran BPBD Kabupaten Gunungkidul periode 2025-2029 adalah Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan Indikator sasaran Indeks Ketahanan Daerah .

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana		Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana (%)	2,65	2,72	2,80	2,88	2,95	3,05	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Terkait dengan perwujudan misi dan sasaran pembangunan serta dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul, BPBD berupaya untuk:

- a) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana;
- b) meningkatkan persentase daerah rawan bencana yang memiliki sistem pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini secara efektif dengan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, kedaruratan dan logistik dan penanganan pasca bencana;
- c) memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ketugasan;
- d) meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan, wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia yang ada;
- e) menciptakan sistem manajemen penanggulangan bencana/kebakaran yang terpadu dengan melibatkan seluruh unsur.
- f) Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Peringatan Dini;
- g) Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana;
- h) Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Kebencanaan;
- i) Penguatan Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana Terpadu;
- j) Penguatan Penanganan Kedaruratan dan Pemulihan Pasca Bencana.

Rumusan strategi untuk pencapaian target kinerja BPBD dirumuskan sebagai berikut:

- a. Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Peringatan Dini;
- b. Penguatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana;
- c. Peningkatan Kualitas SDM dan Pelayanan Kebencanaan;
- d. Penguatan Sistem Manajemen Penanggulangan Bencana Terpadu;
- e. Penguatan Penanganan Kedaruratan dan Pemulihan Pasca Bencana.

3.4 PENAHAAPAN RENSTRA

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan untuk membangun penguatan pondasi pembangunan dalam peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana. Dengan melalui pentahapan strategis ini, BPBD berkomitmen untuk membangun ketangguhan daerah dan masyarakat secara menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu menghadapi dan meminimalkan dampak bencana secara efektif. Pendekatan bertahap ini menjadi kunci untuk mewujudkan visi pembangunan yang aman dan tangguh di tengah tantangan risiko bencana yang semakin kompleks. Rencana Strategis ini juga untuk mendukung capaian RPJMD Kabupaten Gunungkidul periode 2025 – 2029.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra BPBD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan pondasi pembangunan melalui peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana	Percepatan pondasi pembangunan melalui peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana	Peningkatan pondasi pembangunan melalui peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana	Optimalisasi pondasi pembangunan melalui peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana	Pemantapan pondasi pembangunan melalui peningkatan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana

3.5 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah sesuatu ketentuan yang ditetapkan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman, dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan agar semakin menjadi lancar dan terpadu dalam penerapannya secara operasional. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Setelah strategi ditetapkan maka perlu dirumuskan kebijakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Arah perumusan kebijakan tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra BPBD

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebencanaan dan SPM Sub Urusan Kebakaran	Meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas sumber daya dalam menghadapi bencana	Menguatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan terhadap bencana, dan upaya pengurangan risiko bencana	
	a. pelayanan informasi rawan bencana; b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Meningkatkan kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung penanggulangan bencana	Meningkatkan kesiapan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung penanggulangan dan pengurangan risiko bencana	
	a. layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; b. layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; c. layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; d. layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan e. layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.	a. Memperluas cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) untuk meningkatkan jangkauan layanan b. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pemadam kebakaran c. Mengoptimalkan sistem respons cepat dan koordinasi dalam penanganan kebakaran	a. Menambah dan meningkatkan cakupan layanan WMK dalam pemadaman dan pengendalian kebakaran b. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.	
	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, yakni prabencana, darurat bencana, dan pasca bencana dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana serta mengoptimalkan penanganan bencana.	Meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini dan respons cepat terhadap bencana serta penanganan pasca bencana.	Meningkatkan layanan pemerintah dalam peringatan dini, kesiapsiagaan, penyelamatan, evakuasi korban bencana dan penanganan pasca bencana	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak - pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian,

Program yang tertuang dalam renstra 2025 - 2029 ini sudah tertuju sebagai pendukung sasaran dan tujuan yang akan tercapai. Dalam penentuan program yang didalamnya sebagai pendukung tujuan OPD dengan meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) dengan tercapainya tujuan OPD untuk meningkatkan ketahanan daerah diharapkan dapat mengurangi indeks risiko bencana (IRB) sebagai salah satu indikator sasaran daerah.

Selama periode tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 4 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran, dan Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

4.2 KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional / kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi. Program dan Kegiatan berdasarkan urusan yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Selama periode tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah merencanakan 17 Kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya

4.3 SUBKEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berdasarkan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul, dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2030 maka dijabarkan kedalam 92 sub kegiatan dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang disusun untuk lima tahun ke depan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan, sebagaimana tercantum pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra BPBD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
- Terciptanya Kondisi Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatkan ketangguhan daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, serta dalam mengurangi risiko bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapelaagan terhadap bencana	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana		
					Indeks Ketahanan Daerah		
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	1.05.01.2.05 - Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Kependidikan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05 - Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	

					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.05.01.2.05.0003 - Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.05.01.2.06.0008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat Bidang Kedarifatan dan Logistik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bidang PKRR	Pemertasa Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA)	1 05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1 05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1 05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
				Dokumen Informasi Rawan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legai paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personel Tim Resaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah personel Tim Resaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Resaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
				Dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	



					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat Bidang Kedaruratan dan Logistik	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	

					Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Dokumen Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bidang PKRR	Dokumen Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Tim Kerja Kesiapsiagaan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
					Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Dokumen Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Ketua Tim Kerja Pencegahan Bencana	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah data penduduk terpisah di daerah rawan bencana	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
					Jumlah data penduduk terpisah di daerah rawan bencana	1.05.03.2.04.0012 - Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
				Dokumen Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Ketua Tim Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Persentase kalurahan yang terbentuk Relawan Kebakaran	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	

				Dokumen Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sehat, dan Legal	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sehat dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sehat, dan Legal	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	

					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Sebag Tahun). Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
				Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0001 - Pendaftaran Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelayakan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	

					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Ditakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Dokumen pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				Laporan operasi Pencarian dan Pertolongan	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
				Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
				Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	
			Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	Skor Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam Indeks Kebencanaan Daerah (IKD) DIY	2.22.06 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	
				Dokumen Terlaksanannya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	2.22.06.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
				Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	2.22.06.5.07.0018 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	



Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				5.543.888.400,00		5.788.003.802,00		5.833.310.251,00		5.888.887.310,00		6.025.120.887,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.875.388.965,00		3.012.400.179,00		3.032.255.179,00		3.042.455.179,00		3.048.505.179,00		
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83,73	84,13	2.975.388.965,00	84,33	3.012.400.179,00	84,53	3.032.255.179,00	84,73	3.042.455.179,00	84,93	3.048.505.179,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.046.900,00		48.046.900,00		48.046.900,00		48.046.900,00		48.046.900,00		
Dokumen Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	2	48.046.900,00	2	48.046.900,00	2	48.046.900,00	2	48.046.900,00	2	48.046.900,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	16		16		16		16		16			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7		7		7		7		7			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				35.888.900,00		35.888.900,00		35.888.900,00		35.888.900,00		35.888.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	7	35.886.900,00	7	35.886.900,00	7	35.886.900,00	7	35.886.900,00	7	35.886.900,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00		1.080.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	1	1.080.000,00	1	1.080.000,00	1	1.080.000,00	1	1.080.000,00	1	1.080.000,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1.480.000,00		1.480.000,00		1.480.000,00		1.480.000,00		1.480.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2	2	1.480.000,00	2	1.480.000,00	2	1.480.000,00	2	1.480.000,00	2	1.480.000,00		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				1.030.000,00		1.030.000,00		1.030.000,00		1.030.000,00		1.030.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2	2	1.030.000,00	2	1.030.000,00	2	1.030.000,00	2	1.030.000,00	2	1.030.000,00		
1.05.01.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	18	1.700.000,00	18	1.700.000,00	18	1.700.000,00	18	1.700.000,00	18	1.700.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.080.000,00		4.080.000,00		4.080.000,00		4.080.000,00		4.080.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	4.080.000,00	7	4.080.000,00	7	4.080.000,00	7	4.080.000,00	7	4.080.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.036.864.589,00		2.036.864.589,00		2.036.864.589,00		2.036.864.589,00		2.036.864.589,00		
Dokumen Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	2.036.864.589,00	1	2.036.864.589,00	1	2.036.864.589,00	1	2.036.864.589,00	1	2.036.864.589,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	322	434		434		434		434		434			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	13		13		13		13		13			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.001.394.569,00		2.001.394.569,00		2.001.394.569,00		2.001.394.569,00		2.001.394.569,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menetima Gaji dan Tunjangan ASN	322	434	2.001.394.569,00	434	2.001.394.569,00	434	2.001.394.569,00	434	2.001.394.569,00	434	2.001.394.569,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				33.490.000,00		33.490.000,00		33.490.000,00		33.490.000,00		33.490.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	33.490.000,00	1	33.490.000,00	1	33.490.000,00	1	33.490.000,00	1	33.490.000,00		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.960.000,00		1.960.000,00		1.960.000,00		1.960.000,00		1.960.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	13	1.960.000,00	13	1.960.000,00	13	1.960.000,00	13	1.960.000,00	13	1.960.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				41.181.000,00		41.181.000,00		41.181.000,00		41.181.000,00		41.181.000,00		
Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaien Dinas beserta Atribut Kelengkapan			41.181.000,00		41.181.000,00		41.181.000,00		41.181.000,00		41.181.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikut Pendidikan dan Pelatihan	2	1		17		17		17		17			
	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5		5		5		5		5			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-		-		-		-		-		
Tersedianya Pakaien Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaien Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-		-		-		-		-		
1.05.01.2.05.0003 - Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				31.255.000,00		31.255.000,00		31.255.000,00		31.255.000,00		31.255.000,00		
Tertaksananya Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	5	31.255.000,00	5	31.255.000,00	5	31.255.000,00	5	31.255.000,00	5	31.255.000,00		
1.05.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				9.926.000,00		9.926.000,00		9.926.000,00		9.926.000,00		9.926.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	1	8.926.000,00	17	8.926.000,00	17	8.926.000,00	17	8.926.000,00	17	8.926.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				82.482.000,00		51.314.500,00		51.314.500,00		51.314.500,00		51.314.500,00		
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	16	82.482.000,00	12	51.314.500,00	12	51.314.500,00	12	51.314.500,00	12	51.314.500,00		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.197.000,00		3.385.000,00		3.385.000,00		3.385.000,00		3.385.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	4	3.197.000,00	4	3.385.000,00	4	3.385.000,00	4	3.385.000,00	4	3.385.000,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27.486.000,00		19.304.000,00		19.304.000,00		19.304.000,00		19.304.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	16	27.486.000,00	12	19.304.000,00	12	19.304.000,00	12	19.304.000,00	12	19.304.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1.836.000,00		1.836.000,00		1.836.000,00		1.836.000,00		1.836.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	4	1.836.000,00	4	1.836.000,00	4	1.836.000,00	4	1.836.000,00	4	1.836.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				11.919.500,00		11.919.500,00		11.919.500,00		11.919.500,00		11.919.500,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	11.919.500,00	12	11.919.500,00	12	11.919.500,00	12	11.919.500,00	12	11.919.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00	2	2.400.000,00		
1.05.01.2.06.0006 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.100.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	1	2.100.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00	1	2.400.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8.820.000,00		10.070.000,00		10.070.000,00		10.070.000,00		10.070.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	8.820.000,00	12	10.070.000,00	12	10.070.000,00	12	10.070.000,00	12	10.070.000,00		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-		-		-		-		-		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-		-		-		-		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.824.000,00		41.300.000,00		28.000.000,00		37.200.000,00		41.250.000,00		
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	5.824.000,00	30	41.300.000,00	30	28.000.000,00	30	37.200.000,00	30	41.250.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	4		27		30		32		35			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				2.304.000,00		-		-		-		-		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	1	2.304.000,00	30	-	30	-	30	-	30	-		
1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				3.520.000,00		15.000.000,00		18.000.000,00		25.000.000,00		29.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	4	3.520.000,00	27	15.000.000,00	30	18.000.000,00	32	25.000.000,00	35	29.000.000,00		
1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				-		35.000.000,00		-		-		-		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0	0	-	1	35.000.000,00	1	-	1	-	1	-		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	0	-	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		4.300.000,00		4.000.000,00		5.200.000,00		5.250.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	1	4.300.000,00	1	4.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.250.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				271.150.398,00		239.773.210,00		270.128.210,00		270.128.210,00		270.128.210,00		
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	96	271.150.398,00	96	239.773.210,00	96	270.128.210,00	96	270.128.210,00	96	270.128.210,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1		1		1		1		1			
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				125.564.498,00		124.242.310,00		124.242.310,00		124.242.310,00		124.242.310,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	96	125.564.498,00	96	124.242.310,00	96	124.242.310,00	96	124.242.310,00	96	124.242.310,00		
1.06.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	-	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00		
1.06.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				145.435.900,00		115.080.900,00		145.435.900,00		145.435.900,00		145.435.900,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	145.435.900,00	12	115.080.900,00	12	145.435.900,00	12	145.435.900,00	12	145.435.900,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah				511.840.000,00		535.820.000,00		557.720.000,00		558.720.000,00		559.720.000,00		
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	511.840.000,00	1	535.820.000,00	1	557.720.000,00	1	558.720.000,00	1	559.720.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	16		12		12		12		12			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	0		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7	30		30		30		30		30			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	13		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	3		8		8		8		8			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		25.900.000,00		25.900.000,00		25.900.000,00		25.900.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	0	-	1	25.900.000,00	1	25.900.000,00	1	25.900.000,00	1	25.900.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas- Operasional atau Lapangan				340.800.000,00		337.200.000,00		337.200.000,00		337.200.000,00		337.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas- Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	16	340.800.000,00	12	337.200.000,00	12	337.200.000,00	12	337.200.000,00	12	337.200.000,00		
1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7	30	250.000,00	30	250.000,00	30	250.000,00	30	250.000,00	30	250.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				188.670.000,00		188.670.000,00		188.470.000,00		180.470.000,00		180.470.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	3	188.670.000,00	8	188.670.000,00	8	188.470.000,00	8	180.470.000,00	8	180.470.000,00		
1.05.01.2.09.0008 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	1	220.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3.900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	13	3.900.000,00	2	900.000,00	2	900.000,00	2	900.000,00	2	900.000,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.679.743.535,00		1.985.391.000,00		1.751.308.000,00		1.885.301.037,00		1.802.724.698,00		
Meningkatnya Peningkatan Bencana pada Saat Tanggap Darurat Bidang Kedarifatan dan Logistik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	1.328.477.000,00	100	1.258.930.000,00	100	1.258.930.000,00	100	1.352.374.500,00	100	1.352.374.500,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1.328.477.000,00		1.258.930.000,00		1.258.930.000,00		1.352.374.500,00		1.352.374.500,00		
Dokumen Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00	300	100.000.000,00		
Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan kejadian darurat dalam aspek manajemen dan logistik	0	0	1.228.477.000,00	50	1.158.930.000,00	50	1.158.930.000,00	50	1.252.374.500,00	50	1.252.374.500,00		
	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Dikeluarkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievaluasi Per Jenis Kejadian Bencana	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4	4		4		4		4		4			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				-		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	0	-	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				1.035.044.500,00		941.600.000,00		941.600.000,00		1.035.044.500,00		1.035.044.500,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4	4	1.035.044.500,00	4	941.600.000,00	4	941.600.000,00	4	1.035.044.500,00	4	1.035.044.500,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				-		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievaluasi Per Jenis Kejadian Bencana	0	0	-	1	2.750.000,00	1	2.750.000,00	1	2.750.000,00	1	2.750.000,00		
1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota				1.152.500,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		
Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	0	2	1.152.500,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00	2	3.600.000,00		
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				-		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan linas perangkat daerah yang Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan linas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	0	0	-	50	8.000.000,00	50	8.000.000,00	50	8.000.000,00	50	8.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit				-		3.700.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00		3.700.000,00			
Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjad Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	0	0		-	1	3.700.000,00	1	3.700.000,00	1	3.700.000,00	1	3.700.000,00		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					192.280.000,00		192.280.000,00			192.280.000,00		192.280.000,00			
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	12	12	192.280.000,00		12	192.280.000,00	12	192.280.000,00	12	192.280.000,00	12	192.280.000,00		
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bidang PKRR	Persentase Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA)	81,11	83,58	351.268.535,00		85,28	728.481.000,00	88,87	482.378.000,00	88,08	532.928.537,00	89,44	550.350.188,00		
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					5.580.000,00		105.580.000,00		5.580.000,00		5.580.000,00		5.580.000,00		
Dokumen Informasi Rawan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0		-	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-		
1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota					-		100.000.000,00		-		-		-		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	0		-	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-		
Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	60	30	5.580.000,00		30	5.580.000,00	30	5.580.000,00	30	5.580.000,00	30	5.580.000,00		
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					5.580.000,00		5.580.000,00		5.580.000,00		5.580.000,00		5.580.000,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman	80	30	5.580.000,00		30	5.580.000,00	30	5.580.000,00	30	5.580.000,00	30	5.580.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun													
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				213.213.900,00		401.701.000,00		340.218.000,00		340.218.000,00		340.218.000,00		
Dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Mektumet Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0	0	140.928.900,00	12	331.118.000,00	12	255.073.000,00	12	255.073.000,00	12	255.073.000,00		
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0		1		0		0		0			
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				140.673.000,00		116.716.000,00		140.673.000,00		140.673.000,00		140.673.000,00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2	3	140.673.000,00	3	116.716.000,00	3	140.673.000,00	3	140.673.000,00	3	140.673.000,00		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				255.900,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	2	255.800,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				-		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	-	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				-		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Mekanisme Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Mekanisme Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	0	0	-	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00	12	2.400.000,00		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		100.000.000,00		-		-		-		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	0	-	1	100.000.000,00	0	-	0	-	0	-		
Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani			72.285.000,00		70.585.000,00		85.145.000,00		85.145.000,00		85.145.000,00		
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	30	100		80		80		80		80			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0	12		24		24		24		24			
	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24	24		24		24		24		24			
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani													
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				8.212.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	0	12	8.212.000,00	24	19.200.000,00	24	19.200.000,00	24	19.200.000,00	24	19.200.000,00		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				28.715.000,00		14.195.000,00		28.715.000,00		28.715.000,00		28.715.000,00		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	30	100	28.715.000,00	80	14.195.000,00	60	28.715.000,00	80	28.715.000,00	80	28.715.000,00		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kesiapsiagaan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				5.595.000,00		4.450.000,00		4.450.000,00		4.450.000,00		4.450.000,00		
Meningkatnya kompetensi personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	24	24	5.595.000,00	24	4.450.000,00	24	4.450.000,00	24	4.450.000,00	24	4.450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SABELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.03.2.02.0026 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				29.783.000,00		32.780.000,00		32.780.000,00		32.780.000,00		32.780.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1	2	29.783.000,00	2	32.780.000,00	2	32.780.000,00	2	32.780.000,00	2	32.780.000,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				132.462.635,00		219.170.000,00		146.570.000,00		187.115.537,00		204.542.186,00		
Dokumen Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Ketua Tim Kerja Pencegahan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1	12.385.000,00	1	20.465.000,00	1	20.465.000,00	1	20.465.000,00	1	20.465.000,00		
	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia													
1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemertaan Sistem Informasi Kebencanaan				-		-		-		-		-		
Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia			-		-		-		-		-		
1.05.03.2.04.0012 - Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota				-		5.330.000,00		5.330.000,00		5.330.000,00		5.330.000,00		
Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	0	0	-	1	5.330.000,00	1	5.330.000,00	1	5.330.000,00	1	5.330.000,00		
1.05.03.2.04.0014 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				10.260.000,00		13.010.000,00		13.010.000,00		13.010.000,00		13.010.000,00		
Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1	1	10.260.000,00	1	13.010.000,00	1	13.010.000,00	1	13.010.000,00	1	13.010.000,00		
1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota				2.125.000,00		2.125.000,00		2.125.000,00		2.125.000,00		2.125.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1	2.125.000,00	1	2.125.000,00	1	2.125.000,00	1	2.125.000,00	1	2.125.000,00		
Dokumen Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Ketus Tim Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1	111.862.635,00	1	174.600.000,00	0	102.000.000,00	0	142.548.537,00	0	159.972.186,00		
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang diagalkan	1	4		2		2		2		2			
	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota melalui Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	0		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0006 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	0	0		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				111.512.836,00		100.000.000,00		100.000.000,00		140.548.537,00		157.972.188,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1	4	111.512.836,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	140.548.537,00	2	157.972.188,00		
1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				-		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	0	0	-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				148.980,00		72.600.000,00		-		-		-		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0	1	148.980,00	1	72.600.000,00	0	-	0	-	0	-		
Dokumen Pelaksanaan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Tim Kerja Keselamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	8.415.000,00	1	24.105.000,00	1	24.105.000,00	1	24.105.000,00	1	24.105.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Birwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	0		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				5.690.000,00		15.400.000,00		15.400.000,00		15.400.000,00		15.400.000,00		
Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	1	5.690.000,00	1	15.400.000,00	1	15.400.000,00	1	15.400.000,00	1	15.400.000,00		
1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	-	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00		
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				2.725.000,00		2.725.000,00		2.725.000,00		2.725.000,00		2.725.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	1	2.725.000,00	1	2.725.000,00	1	2.725.000,00	1	2.725.000,00	1	2.725.000,00		
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				-		4.780.000,00		4.780.000,00		4.780.000,00		4.780.000,00		
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	0	0	-	1	4.780.000,00	1	4.780.000,00	1	4.780.000,00	1	4.780.000,00		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				888.527.000,00		771.212.623,00		1.048.747.072,00		1.072.141.000,00		1.075.891.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase korban yang terbentuk Relawan Kebakaran	0,69	3,47	888.527.000,00	4,86	771.212.623,00	6,25	1.048.747.072,00	7,84	1.072.141.000,00	9,03	1.075.891.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				863.761.400,00		714.423.023,00		991.057.472,00		1.012.801.400,00		1.013.001.400,00		
Dokumen Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0	0	863.761.400,00	1	714.423.023,00	1	991.057.472,00	1	1.012.801.400,00	1	1.013.001.400,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0	0		5		6		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0		120		12		12		12			
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharu atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Kelempahan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4	3		24		24		24		24			
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0	0	-	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				833.595.400,00		535.817.023,00		795.851.472,00		833.595.400,00		833.595.400,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	12	833.595.400,00	12	535.817.023,00	12	795.851.472,00	12	833.595.400,00	12	833.595.400,00		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				-		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		132.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evaluasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	-	120	132.000.000,00	12	132.000.000,00	12	132.000.000,00	12	132.000.000,00		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		3.800.000,00		3.800.000,00		4.000.000,00		4.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0	-	1	3.800.000,00	1	3.800.000,00	1	4.000.000,00	1	4.200.000,00		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				-		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0	0	-	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				30.168.000,00		20.196.000,00		20.196.000,00		20.196.000,00		20.196.000,00		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	4	3	30.168.000,00	24	20.196.000,00	24	20.196.000,00	24	20.196.000,00	24	20.196.000,00		
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)				-		2.130.000,00		2.130.000,00		2.130.000,00		2.130.000,00		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	0	0	-	1	2.130.000,00	1	2.130.000,00	1	2.130.000,00	1	2.130.000,00		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				-		-		15.000.000,00		-		-		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0	0	-	0	-	1	15.000.000,00	0	-	0	-		
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				-		1.320.000,00		1.320.000,00		1.320.000,00		1.320.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BABELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran. Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran.	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	0	0	-	1	1.320.000,00	1	1.320.000,00	1	1.320.000,00	1	1.320.000,00		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				-		7.200.000,00		8.400.000,00		7.200.000,00		7.200.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0	0	-	5	7.200.000,00	5	8.400.000,00	5	7.200.000,00	5	7.200.000,00		
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Komitmen dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				-		700.000,00		700.000,00		700.000,00		700.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Komitmen dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	0	0	-	1	700.000,00	1	700.000,00	1	700.000,00	1	700.000,00		
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				-		11.380.000,00		11.380.000,00		11.380.000,00		11.380.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0	0	-	1	11.380.000,00	1	11.380.000,00	1	11.380.000,00	1	11.380.000,00		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				1.110.000,00		490.000,00		490.000,00		490.000,00		490.000,00		
Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	1	1.110.000,00	1	490.000,00	1	490.000,00	1	490.000,00	1	490.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelembagaan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	0		1		1		1		1			
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1.110.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	1	1	1.110.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				-		340.000,00		340.000,00		340.000,00		340.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelainan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	0	0	-	1	340.000,00	1	340.000,00	1	340.000,00	1	340.000,00		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				-		1.684.000,00		1.684.000,00		1.684.000,00		1.684.000,00		
Laporan investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian	0	0	-	1	1.684.000,00	1	1.684.000,00	1	1.684.000,00	1	1.684.000,00		
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				-		1.684.000,00		1.684.000,00		1.684.000,00		1.684.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Melalui Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Melalui Penelitian dan Pengujian	0	0	-	1	1.684.000,00	1	1.684.000,00	1	1.684.000,00	1	1.684.000,00		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				23.655.600,00		49.915.600,00		49.915.600,00		49.915.600,00		49.915.600,00		
Dokumen pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran			23.655.600,00		49.915.600,00		49.915.600,00		49.915.600,00		49.915.600,00		
	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran													
	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Kebakaran Lingkungan (SIGKL) Setiap Tahunnya	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0	30		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				3.840.000,00		30.200.000,00		30.200.000,00		30.200.000,00		30.200.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	0	30	3.840.000,00	30	30.200.000,00	30	30.200.000,00	30	30.200.000,00	30	30.200.000,00		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				19.715.800,00		19.715.800,00		19.715.800,00		19.715.800,00		19.715.800,00		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1	1	19.715.800,00	1	19.715.800,00	1	19.715.800,00	1	19.715.800,00	1	19.715.800,00		
1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				-		-		-		-		-		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran			-		-		-		-		-		
1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				-		-		-		-		-		
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran			-		-		-		-		-		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Memerlukan Manusia				-		4.700.000,00		6.800.000,00		7.250.000,00		10.800.000,00		
Laporan operasi Pencarian dan Pertolongan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Memerlukan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	111	20	-	20	4.700.000,00	20	6.800.000,00	20	7.250.000,00	20	10.800.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi yang Sah dan Legal	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi yang Sesuai Standar	0	1		1		1		1		1			
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				-		1.200.000,00		1.800.000,00		1.950.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0	12	-	12	1.200.000,00	12	1.800.000,00	12	1.950.000,00	12	2.000.000,00		
1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi				-		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi yang Sesuai Standar	0	1	-	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00		
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi				-		150.000,00		150.000,00		150.000,00		150.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evaluasi yang Sah dan Legal	0	1	-	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2024		2025		2026		2027		2028			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				-		3.200.000,00		4.500.000,00		5.000.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	111	20	-	20	3.200.000,00	20	4.500.000,00	20	5.000.000,00	20	8.500.000,00		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				-		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Peningkatan Peningkatan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	Skor Peningkatan Peningkatan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam Indeks Kebencanaan Daerah (IKD) DIY	-	-	-	0,80	900.000.000,00	0,82	900.000.000,00	0,84	900.000.000,00	0,86	900.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				-		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Dokumen Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Kelurahan Sosial Budaya	0	0	-	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00		
2.22.08.5.07.0016 - Pembangunan Kelurahan Sosial Budaya				-		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Kelurahan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Kelurahan Sosial Budaya	0	0	-	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00	2	900.000.000,00		

4.4 SUBKEGIATAN DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Subkegiatan dalam mendukung program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah tersaji dalam tabel 4.3

Tabel 4.3
Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD 1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1.05.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1.05.01.2.05.0008 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Baking Cetak dan Penggandaan 1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu 1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Asep Dinamis pada SKPD 1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.05.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Persalinan dan Perlengkapan Kantor	
			1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.05.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bidang PKRR	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Perlengkapan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0016 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
			1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
			1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0023 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	
			1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat Bidang Kedaruratan dan Logistik	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
			1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0007 - Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0006 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0008 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.03.0010 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/Wabah Penyakit	
			1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
		Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bidang PKRR	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.04.0001 - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0003 - Kerja Sama antar Lembaga dan Komitmen dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0004 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	
			1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
			1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0011 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0012 - Fasilitas pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	
			1.05.03.2.04.0014 - Pengujian Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	
			1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
			1.05.03.2.04.0016 - Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	
3.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
			1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	
			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
			1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah tangga	
			1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			1.05.04.2.02.0002 - Peralatan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
			1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
			1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
			1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
			1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
			1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Penderita yang Meningo, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
			1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
			1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
4.	2.22.06 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana dalam IKD DIY	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0018 - Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	

- 4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH
- Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penurunan Indeks Risiko	Persen	2,65	2,72	2,80	2,88	2,95	3,05	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Persen	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85	

- 4.6 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).
- Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2025-2029 agar terlaksana dengan jelas dan obyektif harus dilakukan dengan merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) . IKK digunakan untuk mengukur atau menilai sejauh mana sebuah program dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASLINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	$\frac{\Sigma \text{ warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100$
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	64,87	64,90	65,00	65,10	65,20	65,30	65,40	$\frac{\Sigma \text{ warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	$\frac{\Sigma \text{ warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100$
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	82,73	82,80	83,00	83,10	83,20	83,30	83,40	$\frac{\Sigma \text{ layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah} + \text{Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah}}{\text{kejadian kebakaran di kab/kota}} \times 100$
5	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	10,25	10,22	10,20	10,18	10,16	10,14	10,12	$\frac{\Sigma \text{ tingkat waktu tanggap}}{\text{keseluruhan kejadian kebakaran}}$

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE TAHUN 2024	2025	2026	TARGET TAHUN					KEPERAWAN
(01)	(02)	(03)					(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.03.00.00.00.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah															
XV ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI															
1	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana mengukur penurunan tingkat risiko bencana dengan mempertimbangkan berbagai faktor bencana dan mengacu pada nilai Indeks Risiko Bencana	$\frac{I \text{ (Nilai IRB Sebelum-IRB Sekarang)}}{I \text{ (Nilai IRB sebelumnya)}} \times 100$	Semakin rendah nilai Indeks Risiko Bencana, semakin tinggi persentase penurunan yang tercapai	Indeks Risiko Bencana yang di nilai oleh BNPB Setiap tahun		2,65	2,72	2,80	2,88	2,95	3,05		
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Penilaian IKD dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus (Focus Group Discussion) terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh multistakeholders yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut. Hasil penilaian IKD kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan IRBI	IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertai bukti verifikasi (evidence) seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, dan	Semakin besar nilai Indeks Ketahanan Daerah yang dihasilkan diartikan semakin baik kapasitas Penanggulangan Bencana di Daerah	Indeks Ketahanan Daerah yang ditulis oleh BNPB setiap tahun	0,77	0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,85		
3	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperhitungkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut.	Keterangan: Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah.	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas risiko berdasarkan angka: 1. IRB < 13 adalah rendah 2. IRB 13 - 144 adalah sedang 3. IRB > 144 adalah tinggi Keterangan: Berdasarkan Surat BNPB No B-009/UNPB/PERB/SS.01.01/01/2023 perihal Metode Perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), agar pemerintah daerah melalui BPBD berkolusi pada peningkatan kapasitas yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang berdasarkan 7 prioritas, yaitu: 1. Penguatan kebijakan dan	Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang ditulis oleh BNPB setiap tahun	94,43	94,59-89,29	91,79-87,32	89,30-84,94	86,80-82,56	84,30-80,19	81,80-77,81		
XVI INDIKATOR KINERJA KUNCI															
AA 1.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di daerah merujuk pada pencatatan jumlah korban bencana yang terdampak langsung, upaya penyelamatan dan yang menerima bantuan	$\frac{I \text{ warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{E \text{ warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100$	Semakin tinggi jumlah warga yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi dari peristiwa kebencanaan dan pemberian logistik, semakin menunjukkan kesiapan dan kecepatan bencana tim penanggulangan bencana di	Data dari Bidang Kelautan dan Logistik	82,73	82,80	83,00	83,10	83,20	83,30	83,40		
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Pelayanan Penyelamatan dan mengevakuasi korban kebakaran dihitung berdasarkan jumlah korban kebakaran yang berhasil diselamatkan dibandingkan dengan total jumlah korban	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam lingkup waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau Perangkat Daerah + Jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam lingkup waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat	Semakin tinggi persentase, semakin baik sistem penyelamatan dan evakuasi yang diterapkan	Data dari UPT Damkar	100	100	100	100	100	100	100		
3	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	menghitung waktu tanggap pelayanan kebakaran dari laporan masuk sampai lokasi kejadian	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyajian tim dan peralatan, jarak	Semakin cepat waktu respon kejadian kebakaran semakin baik sistem	Data dari UPT Damkar	10,25	10,22	10,20	10,18	10,16	10,14	10,12		
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	Mengukur persentase jumlah warga negara yang telah menerima layanan informasi komunikasi terkait dengan potensi bencana dan risikonya dibandingkan dengan total jumlah warga yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana $\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	Semakin tinggi persentase jumlah warga yang telah menerima sosialisasi semakin menunjukkan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Data dari Bidang PKRR	100	100	100	100	100	100	100		
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Mengukur persentase jumlah warga negara yang telah menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibandingkan dengan total jumlah warga yang berada di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana $\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100$	Semakin tinggi persentase jumlah warga yang telah menerima layanan pencegahan semakin menunjukkan peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana	Data dari Bidang PKRR	64,87	64,90	65	65,10	65,20	65,30	65,40		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	TARGET							PERANGKAT DAERAH
(01)	(02)					(03)	(04)	(05)	(07)	(08)	(09)	(11)	(13)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT														
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai evaluatif yang mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja BPBD dalam mengelola Program Kegiatan serta penggunaan Anggaran	Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen kualitas dan kemanfaatan	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Akumulasi capaian kinerja dari program	83,73	83,93	84,13	84,33	84,53	84,73	84,93		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Tanggap Darurat Bidang Kedaruratan dan Logistik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di daerah merujuk pada pencatatan jumlah korban bencana yang terdampak langsung, upaya penyelamatan dan upaya	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100$	Semakin tinggi jumlah warga yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi dari peristiwa kebencanaan dan pemberian logistik, semakin menunjukkan kesiapan dan kecepatan respons tim penanggulangan bencana di lapangan.	Data dari Bidang Kedaruratan dan Logistik	100	100	100	100	100	100	100		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bidang PKRR	Persentase Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA)	Mengukur proporsi jumlah kalurahan yang telah memenuhi kriteria sebagai Kalurahan Tangguh Bencana dibandingkan dengan total jumlah kalurahan di	$\frac{\text{Jumlah Kalurahan Tangguh Bencana}}{\text{Total Kalurahan kabupaten Gunungkidul}} \times 100$	Semakin tinggi Persentase jumlah Kalurahan Tangguh Bencana semakin menunjukan kesiapsiagaan di Kalurahan dan semakin besar proporsi wilayah yang memiliki kapasitas untuk mengantisipasi, merespons dampak bencana	Data dari Bidang PKRR	61,11	62,50	63,58	65,28	66,67	68,06	69,44		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN														
Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase kalurahan yang terbentuk Relawan Kebakaran (%)	Terdapatnya Relawan Kebakaran Kalurahan yaitu mengukur statistik yang menunjukkan proporsi jumlah kalurahan di suatu wilayah administratif yang telah memiliki tim relawan kebakaran aktif, dibandingkan dengan	$\frac{\text{Jumlah Kalurahan yang terbentuk atau memiliki Relawan Kebakaran}}{\text{Total Jumlah Kalurahan}} \times 100$	Semakin tinggi persentase kalurahan yang memiliki relawan kebakaran, semakin menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut memiliki tingkat kesiapsiagaan yang baik terhadap ancaman kebakaran	Data dari UPT Pemadam Kebakaran	0,69	2,08	3,47	4,86	6,25	7,64	9,03		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 telah disusun dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 serta isu-isu sub urusan bencana yang harus dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 ini telah memuat tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program (outcome) dan indikator kinerja kegiatan (output) yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya visi, misi dan tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk jangka waktu Tahun 2025-2029. Untuk selanjutnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 Kabupaten Gunungkidul ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Selanjutnya keberhasilan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 tersebut sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran di dalamnya. Pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaannya, secara berkala akan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian yang pada akhirnya akan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Pada akhirnya dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk tahun 2025 - 2029 akan tercapai, serta dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada khususnya serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

